



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH  
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI V DPR RI  
DENGAN DIRJEN SUMBER DAYA AIR DAN DIRJEN PEMBIAYAAN  
INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN  
KEMENTERIAN PUPR RI**

- Tahun Sidang : V  
Masa Persidangan : 2021-2022  
Rapat Ke- :  
Jenis Rapat : RDP  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari, Tanggal : Senin, 4 Juli 2022  
Waktu : Pukul 10.05 s.d. 13.15 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi V DPR RI, (Ruang KK V)  
Gedung Nusantara DPR RI dan Secara Virtual *Zoom Cloud Meeting*
- Ketua Rapat : H. Andi Iwan Darmawan Aras, S.E., M.Si. (F-P.GERINDRA) – Wakil Ketua Komisi V DPR RI
- Acara : 1. Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2022 sampai bulan Mei 2022;  
2. Membahas rencana alokasi anggaran menurut fungsi, program, dan prioritas anggaran K/L TA 2023 masing-masing Unit Eselon I.
- Sekretaris Rapat : Nunik Prihatin Budiastuti, S.H., Kabag Komisi V DPR RI
- Hadir : A. Anggota DPR RI:  
45 dari 55 orang Anggota dengan rincian:  
1. FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP)  
10 dari 11 orang Anggota  
1. Lasarus, S.Sos., M.Si.  
2. Bob Andika Mamana Sitepu, S.H.  
3. Mochamad Herviano  
4. Hj. Sadarestuwati, S.P., M.MA.  
5. Sukur H. Nababan, S.T.  
6. Ir. Sudjadi  
7. Sarce Bandaso Tandiasik, S.H., M.H.  
8. H. Irmadi Lubis  
9. Ir. Effendi Sianipar  
10. Harvey B. Malaihollo
2. FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)  
6 dari 8 orang Anggota  
1. Ir. Ridwan Bae  
2. Drs. Hamka B Kady, M.S.  
3. DR. H. Ali Mufthi, S.AG., M.Si.

4. H. Tubagus Haerul Jaman, S.E.
5. Muhammad Fauzi, S.E.
6. Ir. H. Anang Susanto, M.Si.

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA  
(F-GERINDRA)

6 dari 7 orang Anggota

1. H. Andi Iwan Darmawan Aras, S.E., M.Si.
2. Ir. Sumail Abdullah
3. Sudewo, S.T., M.T.
4. Iis Rosyita Dewi, S.Hum., M.M.
5. Ir. Eddy Santana Putra, M.T.
6. Drs. H. Mulyadi, M.MA.

4. FRAKSI PARTAI NASDEM (F-NASDEM)

4 dari 6 orang Anggota

1. Roberth Rouw
2. Drs. H. Soehartono, M.Si.
3. Sri Wahyuni
4. Drs. Fadholi, M. Ikom.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN  
BANGSA (F-PKB)

5 dari 6 orang Anggota

1. H. Ruslan M. Daud
2. H. Irmawan, S.Sos., M.M.
3. H. Dedi Wahidi, S.Pd.
4. Sofyan Ali, S.H.
5. H. Syafiuddin, S.Sos.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)

4 dari 5 orang Anggota

1. Dr. H. Irwan S.IP., M.P.
2. drh. Jhonni Allen Marbun, M.M.
3. Lasmi Indaryani, S.E.
4. Ir. H. Ishak Mekki, M.M.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN  
SEJAHTERA (F-PKS)

3 dari 5 orang Anggota

1. Ir. H. Sigit Sosiantomo
2. H. Syahrul Aidi Maazat, Lc., M.A.
3. KH. Toriq Hidayat, Lc.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL  
(F-PAN)

5 dari 5 orang Anggota

1. H.A. Bakri H. M., S.E.
2. Athari Ghauthi Ardi

3. Hj. Hanna Gayatri, S.H.
4. H. Boyman Harun, S.H.
5. Mesakh Mirin, SKM.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN  
PEMBANGUNAN (F-PPP)

2 dari 2 orang Anggota

1. H. Syaifullah Tamliha, S.Pi., MS.
2. Dr. H. Muh Aras, S.Pd., M.M.

B. UNDANGAN:

1. Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR RI  
(Ir. Jarot Widyoko Sp-1)
2. Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan  
Umum dan Perumahan Kementerian PUPR RI  
(Ir. Herry Trisaputra Zuna, S.E., M.T)

**JALANNYA RAPAT:**

**KETUA RAPAT/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-P. GOLKAR (H. ANDI  
IWAN DARMAWAN ARAS, S.E., M.Si.):**

***Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,***  
**Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua,**

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI,  
Yang terhormat Dirjen Sumber Daya Air, dan  
Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan  
Rakyat Kementerian PUPR, beserta  
Seluruh jajarannya, serta  
Hadirin yang kami muliakan,**

Mengawali Rapat Dengar Pendapat hari ini, mari kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat bertemu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing dalam keadaan sehat walafiat, baik secara fisik maupun secara *virtual* dari tempat masing-masing.

Menurut laporan dari Sekretariat, daftar hadir Anggota Komisi V DPR RI telah ditandatangani sebanyak 25 orang dari 55 Anggota dan dihadiri secara fisik 10 orang dan *virtual* 15 orang dengan jumlah Fraksi 6 Fraksi sehingga lebih separuh unsur Fraksi, sehingga telah memenuhi kuorum.

Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 281 peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, izinkanlah saya membuka Rapat Dengar Pendapat pada hari ini dan sesuai ketentuan Pasal 276 ayat (1) rapat ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.05 WIB)**

Kami ucapkan terima kasih kepada Dirjen Sumber Daya Air dan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, beserta jajarannya yang telah memenuhi undangan kami dalam Rapat Dengar Pendapat pada hari ini secara fisik, serta turut menghadirkan para Kepala Balai Wilayah Sungai seluruh Indonesia secara *virtual*.

**Para Anggota Komisi V, serta  
Para Dirjen yang kami hormati,**

Sebagaimana kita ketahui bahwa, dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri PUPR pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 yang lalu, telah disepakati beberapa hal di antaranya, Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2023 Kementerian PUPR adalah sebesar Rp98,207 Triliun.

Selanjutnya, Dirjen Sumber Daya Air mendapatkan alokasi sebesar 35,89 Triliun Rupiah yang dipergunakan untuk mendukung kegiatan antara lain, lanjutan pembangunan 24 bendungan, pembangunan irigasi seluas 6.900 Hektar, pembangunan pengendali banjir sepanjang 41 Kilometer dan pembangunan prasarana air baku dan kapasitas 2,5 Meter kubik per detik.

Kemudian, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan mendapat alokasi sebesar Rp165,92 Miliar yang di, yang akan dipergunakan untuk kegiatan di antaranya, peningkatan pendanaan proyek-proyek infrastruktur melalui skema pembiayaan KPBU dan memfasilitasi bantuan pembiayaan perumahan seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), serta Subsidi Selisih Bunga (SSB).

Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami ingin menegaskan kembali agar proses penyusunan Pagu Tahun Anggaran 2023 benar-benar dapat memperhatikan dan mengakomodir saran dan masukan dari Komisi V DPR RI yang disampaikan dalam seluruh rangkaian Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat sampai dengan hari ini.

Demikianlah pengantar dari kami. Selanjutnya, kami berikan kesempatan kepada Dirjen Sumber Daya Air dan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR untuk menyampaikan penjelasan yang lebih spesifik mengenai rencana kerja dan anggaran masing-masing unit organisasinya pada Tahun Anggaran 2023.

Untuk kesempatan pertama akan kami persilakan kepada Bapak Dirjen Sumber Daya Air. Silakan, Pak.

**DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA AIR KEMENTERIAN PUPR RI (Ir.  
JAROT WIDYOKO, Sp-1):**

Terima kasih.

**Yang kami hormati Pimpinan, Ketua Komisi V DPR RI,  
Yang kami hormati Bapak-Ibu Anggota Komisi V DPR RI,**

**Yang kami hormati pula Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR,**

***Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh,***  
**Shalom,**  
**Om Swastiastu,**  
**Namo buddhaya, dan**  
**Salam kebajikan,**

**Yang kami hormati Bapak Pimpinan, beserta**  
**Bapak Anggota Komisi V yang kami hormati,**

Pada pagi hari ini, kami akan menyampaikan dan melaporkan kegiatan Tahun 2022 dan juga nanti adalah rencana program untuk Tahun 2023.

Untuk Tahun Anggaran 2022 dapat kami laporkan bahwa, DIPA induk Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Pagu awal Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Tahun 2022 sebesar 41,23 Triliun, yang terdiri dari program ketahanan sumber daya air sebesar 38,78 Triliun dan program dukungan manajemen sebesar 2,45 Triliun.

Sampai dengan 30 Juni 2022 pagu Direktorat Jenderal Sumber Daya telah bertambah sebesar 1,46 Triliun, sehingga pagu total SDA sebesar 42,69 Triliun. Penambahan tersebut antara lain berupa luncturan SBSN sebesar 172 Miliar, luncturan pinjaman luar negeri sebesar 370 Miliar dan percepatan pinjaman luar negeri sebesar 730 Miliar dan tambahan dari BA-BUN untuk *event* internasional sebesar 170, 187 Triliun, *eh*, Miliar, mohon maaf.

Pagu Tahun Anggaran 2022 sebesar 42,69 Triliun terdiri dari:

- Belanja modal sebesar 31,38 Triliun;
- Belanja barang sebesar 10,21 Triliun; dan
- Belanja pegawai sebesar 1,1 Triliun.

Dalam pagu Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Tahun 2022 terdapat blokir *automatic adjustment* sebesar 1,676 Triliun, ini yang pertama, yang merupakan cadangan anggaran pemerintah dalam rangka mitigasi dampak berlanjutnya dan memburuknya kondisi pandemi Covid-19 sesuai dengan surat Menteri Keuangan Nomor: S-1088/MK.02/2021 tanggal 29 November 2021, hal: *automatic adjustment* belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2022.

Selanjutnya, dalam waktu dekat akan dilakukan blokir *automatic adjustment* tahap ke dua sesuai dengan surat Menteri Keuangan Nomor: S/458/MK.02/2022 tertanggal 23 Mei 2022, hal: penambahan *automatic adjustment* belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2022, di mana Direktorat Jenderal sumber daya air menambah atau mendapat 1,383 Triliun, sehingga total blokir *automatic adjustment* sebesar 3,059 Triliun

Target pembangunan infrastruktur SDA Tahun 2022 antara lain:

- 47.119 Hektar daerah irigasi;
- 153.333 Hektar rehabilitasi jaringan irigasi;
- 32 bendungan direncanakan, 9 bendungan di antaranya akan selesai dibangun Tahun 2022;
- 28 embung;
- 157 Kilometer pengendali banjir dan pengaman pantai; dan
- 3,48 Meter kubik per detik ketersediaan air baku.

Beberapa program strategis yang dilaksanakan Tahun Anggaran 2022 dapat dilaporkan sebagai berikut:

- Kegiatan bendungan dan danau meliputi lanjutan pembangunan 32 bendungan antara lain:
  - Bendungan Keureuto;
  - Rukoh dan bangunan pengarah, lalu;
  - Bendungan Lau Simeme;
  - Bendungan Tiga Dihaji;
  - Bendungan Karian;
  - Bendungan Leuwikeris;
  - Cipanas;
  - Jragung;
  - Jlantah;
  - Bener;
  - Pidekso;
  - Bagong;
  - Sidan
  - Meninting
  - Tiu Suntuk;
  - Temef;
  - Manikin;
  - Sepaku Semoi;
  - Bolango Ulu;
  - Budong-Budong;
  - Ameroro;
  - Pamukkulu;
  - Way Apu; dan
  - Penyelesaian Alor Tano Ponggol di Danau Toba, Danau Sipin, Danau Teloko, Danau Rawa Pening, Limboto, dan Danau Tondano.

Sedangkan, kegiatan irigasi dan rawa antara lain:

- Pembangunan DI. Jambo Aye Kanan;
- DI Lhok Guci;
- DI Sidilanitano;
- DI Sei Wampu;
- DI Osaka;
- DI Batang Asai;
- DI Lematang;

- DI Komerling;
- DI Slinga;
- Bali Asa.

Lalu juga ada rehabilitasi DI Pante Lhong, DI Kreung Pase, DI Batang Gadis, DI Siak Kiri, DI Aritam atau Baku Tuo, DI Karang Agung, DI Way Rarem, DI Way Umpu, DI Cisadane, DI Mrican, DI Sampean, DI Kaibun, DI Wawotobi, DI Purik, dan Daerah Irigasi Rawa Tanah Miring.

Kegiatan air baku dan air tanah dan air baku dapat kami laporkan meliputi kegiatan embung antara lain Baku Embung Sebayar dan Embung Serasan, Embung Universitas Andalas, Embung Untirta, lanjutan Embung Sanur, Embung Karangrejo, Embung Mranggen, Embung Air Baku Kasih Di Pati, Embung Hargobinangun, dan Embung Noa Tea, Embung Gogo Dalam dan penyediaan air baku di Lumbung Humbang Hasundutan.

Lalu juga Air Baku Spam Ikaka Sukarame, Air Baku Pulau Pisang, Air Baku Kali Ori, Umbul Jumprit, Air Baku Desa Pao, Air Baku Endawangan, Air Baku Sangkulirang dan Air Baku Parodo Tana Rojo, Tanah Toraja mohon maaf.

Lalu juga kegiatan sungai dan pantai antara lain, pengendalian banjir Krueng, PU Sangan, Keruing Geunteut, Sungai Bedera, Rob Langan, Sungai Deli, Kampar, Indragiri, Muara Sungai Batang Bungo, Batang Lembang, Batang Tahapan, Lambidaro, Sungai Bendung, Sungai Sendawa, Sumbawa, Design Sungai Cibanten, longsor di Cisadane Hilir, sungai Cimanuk, Cimeneng, lalu Citanduy, Sungai Jambu, Kali Jeroan, Ring Ngotok Kanal, Penanganan Banjir Bandara Juanda, Rob Sidoarjo, *Design* banjir Bandara Kediri, Sungai Lamong, Sungai Kapuas, Kuala Nai, Sungai Masamba, Sungai Ira Riam dan Banjir Kota Merauke, Sungai Digul, Sungai Krangkeng, dan Pantai Karanganyar, *Breakwater* Lamongan, lalu juga Gilimanuk, Pantai Tegal Besar, Pantai Leon, *Breakwater* Selayar, dan Pantai Abokarei Yapen.

### **Bapak-Ibu yang kami hormati,**

Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air sampai saat ini adalah 35,09% kurang lebih 14,9 Triliun dari total Pagu sebesar 42,69 Triliun, sedangkan realisasi fisik sebesar 38,38%.

Selanjutnya, dapat kami laporkan pelaksanaan *tender* untuk pekerjaan kontraktual Tahun 2022 adalah sebagai berikut, dari total 1.534 senilai 11,9 Triliun status per dua juli dapatkan kami lebankan sebagai berikut, bahkan yang belum dilelangkan sebanyak 133 senilai 1,148 Triliun kebanyakan dari *loan* dan ada beberapa yang baru, misalnya untuk yang kayak kegiatan-kegiatan untuk melihat terjadinya bencana, juga jumlah paket yang sedang dalam proses lelang ada 120 paket senilai 1,759 Triliun, jumlah paket yang sudah *tender* dan siap terkontrak 108 paket, senilai 605 Miliar, sedangkan yang sudah terkontrak sebanyak 1.176 paket senilai 8,39 Triliun.

Untuk kegiatan padat karya dapat kami laporkan kepada Bapak-Ibu sekalian, Tahun Anggaran 2022 dari total pagu 4,81 Triliun telah terealisasi sebesar 1,93 Triliun atau kurang lebih 40,12 Triliun dengan jumlah tenaga kerja 164.000 pekerja.

Pada Tahun 2022, Kementerian PUPR mendapat tugas tambahan dari Bapak Presiden melalui Perpres 116 Tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Untuk Mendukung Penyelenggaraan Acara Internasional di Bali, DKI, dan Nusa Tenggara Barat, serta Nusa Tenggara Timur.

Dapat kami laporkan bahwa, dukungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air terhadap tugas tambahan dimaksud, yaitu melakukan pembangunan di Embung Sanur, rehabilitasi Waduk Muara dan revitalisasi Danau Archipelago Taman Mini Indonesia Indah untuk mendukung acara G20, serta pembangunan pengendali banjir kawasan Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah untuk mendukung *event* Motor GP.

**Bapak-Ibu, Pimpinan, Ketua Komisi V, dan  
Bapak-Ibu Anggota Komisi V yang kami hormati,**

Kami laporkan pada kesempatan yang baik ini untuk Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan surat Menteri PUPR Nomor: KU.0212-MN/780 tanggal 5 April 2022 hal usulan kebutuhan anggaran Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2023, kebutuhan anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Tahun Anggaran 2023 adalah 65,35 Triliun. Dari kebutuhan tersebut, sebesar 10,5 Triliun bersumber dari *loan* dan SBSN dan sisanya rupiah murni. Sebesar 27,4 Triliun rupiah murni direncanakan untuk kontrak tahun jamak.

Berdasarkan surat bersama Menteri PPN/ Kepala Bappenas Nomor: B-301/M.PPN/B.8/PP.04.02/04/2022 dan Menteri Keuangan Nomor: S-353/MK.02/2022 tanggal 18 April 2022 ditetapkan Pagu Indikatif Direktorat Jenderal SDA Tahun 2023 sebesar 35,89 Triliun atau sekitar 54,91 dari kebutuhan anggaran yang diusulkan.

Rincian Pagu Indikatif tersebut adalah sebagai berikut:

- Program ketahanan sumber daya air sebesar 33,30 Triliun;
- Program dukungan manajemen sebesar 2,587 Triliun.

Dari program tersebut, direncanakan pemanfaatannya adalah sebagai berikut:

Yang pertama, program ketahanan pangan atau program ketahanan sumber daya air sebesar 22,77 Triliun bersumber dari rupiah murni, di mana di dalamnya ada 12,27 Triliun digunakan untuk alokasi kontrak tahun jamak.

Kami laporkan bahwa alokasi ini hanya bisa dipenuhi sebesar 46,65% dari total kebutuhan 26,3 Triliun atau masih terdapat kekurangan 14,03 Triliun.



Sebesar 10,5 Triliun digunakan untuk menjaga keberlanjutan fungsi infrastruktur melalui kegiatan OP, pelaksanaan P3TGAI di 10.000 lokasi, pencadangan bencana, pengadaan tanah, dan pengendalian lumpur Sidoarjo dan *Turbin West*.

Sebesar 5,2 Triliun ini berasal dari SBSN antara lain difokuskan pada penyelesaian pembangunan dan rehabilitasi beberapa daerah irigasi, seperti Daerah Irigasi Rentang, Daerah Irigasi Lapuk Selatan, Daerah Selinga, penanganan banjir dan penanganan pantai pada Pantura, Jawa, dan wilayah pascabencana, serta penyediaan air baku dari bendungan seperti air baku Waduk Pidekso, Waduk Gongseng, dan Waduk Tukul.

Yang ketiga sebesar 5,33 Triliun bersumber dari *loan* untuk kegiatan irigasi, rawa, sungai, pantai antara lain, DI Rentang Komerling, *Urban Flood Control*, Bali Beats, Bendungan Wonogiri, Bendungan Karyan, rehab-rekon Palu pasca bencana.

Pada program dukungan manajemen sebesar 2,59 Triliun bersumber dari rupiah murni dialokasikan untuk gaji, tunjangan pegawai sebesar 1,15 Triliun, untuk belanja operasional seperti berlangganan listrik, telepon, pemeliharaan gedung, kendaraan sebesar 737,3 Miliar, serta untuk belanja nonoperasional seperti administrasi kegiatan sebesar 700,13 Miliar.

Dengan alokasi Pagu Indikatif tersebut mempunyai implikasi kebutuhan kontrak tahun jamak sumber pendanaan rupiah murni hanya dialokasikan sebesar 12,27 Triliun atau hanya 46,65% dari total kebutuhan 26,34 Triliun atau kekurangan sebesar 14,07 Triliun, sehingga akan menambah beban kebutuhan MWC di tahun berikutnya.

Yang b, MWC difokuskan beberapa proyek yang ditargetkan selesai Tahun 2023, misalnya dari 13 bendungan yang semua ditargetkan pada Tahun 2023, maka hanya akan ada 3 bendungan yang selesai: Cipanas, Karian, dan Sepaku Semoi. Alokasi operasi dan pemeliharaan fisik sama dengan Tahun 2022; Pengadaan tanah terbatas; dan P3TGAI tetap diprogramkan sesuai sejumlah 10.000 lokasi.

Mohon izin juga, kami laporkan kepada Bapak-Ibu sekalian dengan Pagu Indikatif tersebut, maka target utama Tahun Anggaran 2023 adalah pembangunan irigasi seluas 6.900 Hektar antara lain, dari Irigasi Komerling, Slinga, Bali Asa, Gilirai, Bintang Bano, dan Beringin Sila.

Lalu juga ada daerah rehabilitasi irigasi seluas 98,700 Hektar ada di daerah Rentang, Manganti, Lokung, daerah irigasi Delapan Barat, Mrican, Karang Talun, Sadang, Tabo-Tabo, dan Wakatobi. Sedangkan daerah pengendalian banjir cadangan pengendalian banjir kurang lebih 41 Kilometer ada di Pulau Samosir, Dharmasraya, Batang Lembang, Batang Hari, Sodetan Kali Ciliwung, Sungai Bogowonto, DAS Hijau, DAS Tipar, Sungai Loji Bener, Pengendalian Banjir Kawasan Tambak Lorok, Kali Pepe Hulu dan Anak Sungai Bengawan Solo, serta Karet Joana, dan Kali Jeroan.

Pembangunan pengaman pantai 25 Kilo ada di Melabuh, pantai terluar di Pulau Riau, Pantai Kabupaten Kaur, Pantai KEK Tanjung Lesung, Pantai Eretan, Pantai di Cirebon, lalu Pantai di Cilacap, lalu ada di Sambas, Pantai Manggar, Pantai Pasang Kayu Sulbar, Pantai Halmahera Barat, dan Pantai Raja Ampat. Pembangunan pengendali sedimen dan lahar atau gunung berapi ada 4 unit, Groundsill Cipamingkis, pengendali sedimen Sungai Radha.

**Bapak-Ibu yang kami hormati,**

Dapat kami laporkan juga pembangunan, penyelesaian pembangunan 24 bendungan, ada Keureuto, Rukoh, Lau Simeme, Jlantah, Pamukkulu, Tiu Suntuk, Meninting, Temef, dan Way Apu.

Lalu juga ada peningkatan kapasitas air baku 2,5 Meter kubik per detik, air baku Pulau Pisang, air baku Bendungan Kuningan, air baku Pidekso, air baku Taman Kalasan KSPN Borobudur, air baku Bendungan Gongseng, air baku Bendungan Lola, air baku Pasal Loreng, air baku Wajo, air baku Raja Ampat, air baku Kaekasong dan air baku Lani Jaya. Pembangunan 3 buah embung, Embung Gemulem, Embung di Kabupaten Cilacap, Embung Jaro Kabupaten Tabalong.

Lalu yang terakhir, dalam rangka pengendalian lumpur Sidoarjo, kami melaksanakan pengaliran lumpur ke, sekali porong sebesar 22 Juta Meter kubik dan memperkuat tanggul penahan lumpur sepanjang 400 Meter.

Dengan alokasi Pagu Indikatif tersebut, Program Padat Karya Tahun 2023 direncanakan sebesar 4,7 Triliun, terdiri dari P3TGAI sebesar 2,25 Triliun dan pelaksanaan OP dengan pola padat karya sebesar 2,45 Triliun, total jumlah tenaga kerja yang diperkirakan akan terserap adalah 328.000 orang.

**Bapak-Ibu,**

Demikian yang bisa kami laporkan, ini adalah tidak bisa kami sampaikan semua, makanya di situ kami tulis antara lain kegiatan-kegiatan yang direncanakan tahun untuk 2023. Mohon masukan dari Bapak-Ibu sekalian, kami harapkan kegiatan ini lebih mengerucut dan yang paling penting bermanfaat bagi masyarakat. Kalau ada yang kurang berkenan kami mohon maaf.

Akhir kata.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,*

Saya persilakan dulu ya, Pak Dirjen Pembiayaan Infrastruktur. Silakan, Pak.

**DIREKTUR JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN KEMENTERIAN PUPR RI (Ir. HERRY TRISAPUTRA ZUNA, S.E., M.T):**

**Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI,  
Dirjen SDA beserta jajaran,**

***Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,***  
**Selamat pagi,**  
**Salam sejahtera bagi kita semua,**  
**Om swastiastu,**  
**Namo budaya,**  
**Salam kebajikan,**

Izinkan, kami menyampaikan paparan berkenaan dengan evaluasi pelaksanaan APBN Tahun 2022 dan Program Kerja Tahun 2023 untuk Dirjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan.

Realisasi Anggaran Tahun 2022 per hari Jumat, 1 Juli 2022 mencapai 171,6 Miliar atau 32,28%. Ini lebih tinggi dari periode yang sama pada tahun lalu sebesar 90,8 Miliar atau 11,48%.

Anggaran DJPI atau Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2022 adalah sebesar 512,47 Miliar. Alokasi tersebut mengalami beberapa revisi DIPA dari yang semula sebesar 178,16 Miliar menjadi 512,47 Miliar. Perubahan tersebut meliputi kegiatan PHLN, ada BP2PT, eks risk dan *to road and bridge final business case*.

Target KBPU Tahun 2022 meliputi tahap penyiapan sebanyak 26 proyek dan tahap transaksi sebanyak 11 proyek. Adapun target bantuan pembiayaan perumahan meliputi KPR FLPP sebanyak 200.000 unit, SSB sebanyak 769.903 unit, SBUM sebanyak 200.000 unit dan BP2BT sebanyak 22.582 unit dan Tapera sebanyak 109.000 unit.

Hingga akhir 2022, realisasi penyaluran bantuan pembiayaan perumahan Tahun 2022 adalah sebagai berikut, FLPP sebanyak 49,78% atau 99.557 unit, SSB sebesar 2,53% atau 101,08 Miliar, kemudian SBUM mencapai 31,79 Mil, persen atau sebanyak 63 koma, 63.587 unit dan BP2BT sebanyak 2.463 unit atau 33,81% dari target DIPA *eksisting*.

Progres KBPU Tahun 2022 adalah untuk sektor, *nah* terdiri dari 26 proyek untuk penyiapannya, untuk jalan dan jembatan ada 13 proyek antara lain, jalan pendukung IKN, OM Suramadu, jalan akses *exit* tol, jalan tol Cilacap–Yogyakarta, jalan tol Demak – Tuban, Ngawi – Bojonegara Babat, Tulungagung ke Jembatan Laut Tanah Bumbu, Jembatan Muna Buton, Tuban-Gresik dan Kohot Lebak Wangi.

Dari sektor SDA ada 6 proyek yang dalam penyiapan meliputi, Bendungan Merangin di Jambi, PLTS Tiga Dihaji, Revitalisasi Modern Irigasi Sistem Interkoneksi HLD WS Lombok, PLTMH, Bendungan Rotiklot dan PLTS

Bendungan Napun Gete, DI Kom, DI Kom, DI Komerling ini untuk OP sistem irigasi.

Sektor perumahan ada 2 *project*, yaitu Karawang Spur dan IKN I di Kalimantan Timur. Kemudian sektor permukiman ada 5 *project*, yaitu KPBU *type* Manggar, KPBU *Region* Jatigede, Jatiluhur, dan lainnya.

Untuk tahap transaksi ada 11 *project* yang-yang disiapkan, yaitu untuk jalan jembatan 5 *project*, yang terdiri dari jembatan Batam–Bintan, Trans Papua, kemudian Kediri–Tulungagung, Malang–Kepanjen, dan Jembatan Suramadu.

Sektor sumber daya air Bendungan Bodri dan pemeliharaan bendungan dan penyediaan infrastruktur pembangkit listrik mini hidro, Bintang Bano.

Perumahan diharapkan nanti untuk apa Cisaranten di Bandung dan KEK Semangke. Kemungkinan, kemudian untuk sektor permukiman sebanyak 2 *project*, yaitu spam Jatiluhur II dan pendampingan transaksi SPAM Regional Sinum Radijam di Jawa bar, di Jawa Barat.

Selanjutnya, izinkan kami menyampaikan Program Kerja Tahun 2023. Dalam rangka pemenuhan pencapaian target Renstra, DJPI membutuhkan anggaran sebesar 382 Miliar, alokasi yang tersedia adalah sebesar 165,9 Miliar.

Pagu Indikatif DJPI Rp165.919.391.000,- dengan postur anggaran, yang pertama alokasi program untuk dukungan manajemen sebanyak 136.687.358.000,- dan perumahan dan kawasan sebenarnya 29,2 Miliar.

Alokasi pada sumber dana terdiri dari rupiah murni sebanyak 164,9 Miliar dan pinjaman luar negeri sebanyak 1 Miliar. Alokasi per belanja, belanja pegawai sebanyak 45,3 Miliar dan belanja barang sebanyak 118,8 Miliar, belanja modal sebanyak 1,7 Miliar. Alokasi Pagu Indikatif tersebut masing-masing digunakan untuk, oleh masing-masing Eselon, unit Eselon II di lingkungan DJPI, ya, seperti terlampir.

Kemudian, pada Tahun 2023 target pembiayaan perumahan diusulkan sebanyak 274.924 unit yang terdiri dari FLPP sebanyak 220.000 unit, subsidi selisih bunga 3,8 Triliun, subsidi bantuan uang muka 220.000 unit dan tabungan perumahan rakyat sebanyak 54,9 ribu.

Indikasi proyek KPBU Tahun 2023 sebanyak 26 proyek, di mana 10 proyek dalam tahap transaksi dan 16 proyek, *eh*, maaf 10 proyek dalam tahap penyiapan dan 16 proyek dalam tahap transaksi. Untuk proyek tahap penyiapan antara lain, Bandung *Intra Urban Toll Road* dan Tuban-Gresik.

Kemudian, di sektor SDA ada, apa Bendungan Muara Juloi di Kalimantan Tengah, kemudian rumah susun Mamminasata, serta sektor permukiman antara lain SPAM Ibu Kota, IKN, pendampingan proyek KPBU di beberapa daerah.

Lalu yang tahap transaksi diharapkan di sektor jalan ada dua proyek, yaitu tol Cilacap–Yogyakarta dan Demak–Tuban. Di sektor sumber daya air ada 7 *project*. Kemudian, di perumahan ada 4 proyek dan di permukiman ada 3 proyek.

Demikian, yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf.

Akhir kata *wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh*.

**KETUA RAPAT:**

***Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,***

**Bapak-Ibu sekalian,**

Demikian pemaparan dari para Dirjen. Selanjutnya, kami akan mempersilakan kepada Anggota untuk menyampaikan pendalaman atau pertanyaan. Pak Hamka pertama, silakan Pak.

**F – P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS.):**

Terima kasih, Pimpinan.

***Bismillahirrahmanirrahim,  
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,***

**Pimpinan dan seluruh Anggota yang saya hormati,  
Pak Dirjen, Dirjen bina, Dirjen SDA dan Bina Konstruksi, dan  
Seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan ini.**

**KETUA RAPAT:**

Pembiayaan infrastruktur, Pak.

**F – P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):**

Pembiayaan infrastruktur *sorry*, tadinya ke lelang terus kita ini.

Pertama, saya ingin menyampaikan dulu hasil pembicaraan kami dengan Kementerian Keuangan di Banggar pada laporan akhir semester kemarin dan kesimpulan rapatnya bahwa, apa yang dimaksud Pak Dirjen tadi *automatic adjustment* dua kali itu akan direlaksasi. Kalau *toh* terjadi, itu mungkin yang pertama saja, kalau terjadi. Kenapa? Karena penerimaan negara sudah memungkinkan untuk itu, karena baru-baru ini juga ada *windfall profit* daripada kenaikan harga bahan apa namanya harga minyak, walaupun dalam, walaupun demikian juga tentu karena kita impor juga harganya tinggi.

*Nah*, oleh karena itu, apa yang ingin saya *address* di sini adalah tolong diingatkan lagi, tolong *di-review* lagi dan menyampaikan kepada Kementerian

Keuangan hal-hal yang perlu dilaksanakan. Karena salah satu poin keputusan kita bahwa, baik yang strategis nasional maupun yang tidak strategis nasional apabila itu penting dilakukan segera dilakukan dengan mencabut *automatic adjustment* ini.

Lebih jauh lagi saya ingin menyampaikan dan kita akan evaluasi, sampai sejauh mana usulan-usulan kami yang lalu Tahun 2022 sampai sejauh mana pengaruhnya terhadap *automatic adjustment* ini.

Oleh karena itu, *address* ini saya sampaikan agar supaya semua usulan yang telah kami usulkan pada rapat-rapat kerja yang lalu, itu dapat diakomodir dengan baik, dengan adanya relaksasi daripada *automatic adjustment*, jangan yang menjadi sasaran pengurangan itu adalah usulan-usulan aspirasi Anggota.

Ini yang pertama, karena ini kemarin kita putus di Badan Anggaran Bapak dan Ibu sekalian, persis jam 1.23 setelah Jumat dengan Menteri Keuangan melakukan relaksasi terhadap *automatic adjustment* tersebut. Nanti akan ada penyampaian dari Menteri Keuangan untuk Bapak dan Ibu sekalian, intinya adalah bahwa jangan menjadi alasan ataukah suatu patokan bahwa dengan adanya *automatic adjustment* apa yang kami telah usulkan itu menjadi *pending* adanya, itu catatan pertama yang ingin saya sampaikan Pak Dirjen supaya bisa menelusuri dan menindaklanjuti apa yang saya sampaikan pada hari ini, karena salah satu poin kesimpulan dan Menteri Keuangan pun menyetujui, termasuk anggaran seluruh K/L dan DPR, itu yang pertama.

Yang ke dua, terkait beberapa hal yang ingin kami harapkan di Tahun 2023 terutama padat karya. Oleh karena itu, padat karya ini seperti apa yang kami bicarakan dengan beberapa Dirjen yang lalu, untuk sementara kami tidak bisa membicarakan anggaran Bapak hari ini dulu karena akan terjadi pergeseran, akan kami bicarakan dengan Menteri, jadi kesimpulan kita hari ini harus hanya kualitatif saja belum menyetujui angka kuantitatif karena pergeseran anggaran bukan kewenangan Bapak tentu kewenangan Menteri.

*Nah*, oleh karena itu, Pimpinan mohon barangkali kita skors sementara dulu untuk kita bicarakan mengenai Tahun 2023 terhadap program-program padat karya yang telah disampaikan di atas tadi, ada empat koma sekian triliun terdiri dari P3TGAI dan OP.

Saya kira itu saja saran saya, mohon barangkali waktunya untuk kita bisa *break* dulu, untuk kita diskusi terkait padat karya, karena Tahun 2023 sudah masuk tahun-tahun politik, banyak hal yang ingin kami sampaikan kepada Pak Dirjen. Demikian, Pimpinan.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Baik. Terima kasih, Pak Hamka.

Anggota yang lain setuju kita skors? Rapat saya skors 30 menit ya, Pak.

**(RAPAT DISKORS PUKUL 10.30 WIB)**

Baik, skors saya cabut.

**(SKORS DICABUT PUKUL 11.00 WIB)**

**Bapak-Ibu sekalian,**

Selanjutnya, dari Anggota masih ada yang ingin disampaikan mungkin? Pak Sudewo, selanjutnya siapa? Pak Mulyadi, setelah itu Pak Bakri.

**F- P. GERINDRA (Drs. H. MULYADI, MMA.):**

*Bismillahirrahmanirrahim,  
Assalamu'alaikum warahmatullahita'ala wabarakatuh,*

Terima kasih, Ketua.

**Yang saya hormati rekan-rekan Komisi V,  
Anggota Komisi yang saya hormati, beserta  
Pemerintah dalam hal ini Dirjen Sumber Daya Air, dan  
Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan,**

Saya, beberapa hal saja, Pimpinan. Pertama menguatkan tentang hasil kunjungan spesifik kita ke NTB, ya. Saya kira dengan segala dinamikanya, izin Pak Dirjen, kita berharap ini adalah agenda pusat, Pak. Kenapa, karena dalam konteks *event* internasional yang sudah dilakukan dukungan oleh pihak Ditjen Sumber Daya Air, saya kira harus diperkuat bahwa cadangan air baku itu harus betul-betul disiapkan ya.

Saya sudah pernah katakan bahwa, setiap pembangunan harus memiliki nilai tambah terhadap kehidupan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Saya kira kalau misalnya bendungan diorientasikan untuk cadangan air baku, untuk *men-support* kegiatan dalam kalender-kalender internasional Mandalika, saya kira itu harus menjadi agenda pusat untuk menguatkan daya dukung terhadap keberadaan sirkuit Mandalika.

Ke dua, Pak. Saya terus terang diakses oleh warga di area pembangunan Bendungan Ciawi, Pak. Ciawi, Bogor Pak ya. Itu dampaknya dua, Pak, pertama mohon diingatkan para kontraktornya bahwa itu ada apa namanya dampak terhadap keruhnya air dan ke dua rusaknya jalan Kabupaten, Pak ya. Belum lagi kami berharap itu segeralah Pak, diresmikan gitu jangan *delay* terus, Pak, ya.

Kemudian Pak, saya dari awal sudah melakukan sebagai warga Dapil sudah ikut mensosialisasikan tentang keberadaan Bendungan Cijurai dan Cibeet, Pak ya. Saya berharap, ini ada rencana Bapak ke depan Tahun 2023 kan saya harus menyimak dengan baik, supaya apa karena nama kami pun di

Dapil dipertaruhkan, Pak, sudah membantu sosialisasi tapi *roadmap* yang masih *delay* dan seterusnya.

Saya kira, saya juga berterima kasih kepada Tim Bapak di Balai Jawa Barat yang terus berkoordinasi, karena saya minta di-*update* terus, Pak. Kalau kami kan berhadapan langsung dengan masyarakat Pak, *gitukan*, sudah disosialisasikan dulunya *resistance* sekarang *welcome*, tapi *roadmap* atau *timetable* nya atau *action plan*-nya kami belum *clear*, tapi karena kami terus berkoordinasi dan sangat kooperatif dan komunikatif ya pihak balai Pak, dari Jawa Barat termasuk Satkernya, saya kira dari Dirjen, Pak Dirjen harus juga mengabarkan kita di *update*, Pak, supaya kami tidak *gelagapan*, Pak, udah ditanya oleh masyarakat.

Kemudian, saya mengingatkan Pak Dewo juga ikut menghadiri, audiensi dari warga apa namanya Bojong Kulur, Pak, itu tolong dibantu Pak, karena saya kira walaupun Bapak sudah meng-*update* saya terkait koordinasi dengan pihak daerah Pak, Jawa Barat, saya kira dari Dirjen Sumber Daya Air harus segera ada *action plan* juga, Pak, supaya kami juga tidak gagap kalau ditanya, gagap dan gugup bahkan kalau ditanya kapan ada *action plan* terhadap kehadiran mereka untuk minta bantuanlah, dalam tanda petik supaya masyarakat bisa tidak lagi *waswas* setiap hari.

Saya itu di *update* terus Pak dengan kondisi di sana, bahkan saat kunjungan langsung Pak tentang penyempitan sungai Cikeas – Cileungsi akibat adanya pembangunan di wilayah sana karena itu *developer* besar, Pak. Saya kira negara harus hadir.

Terakhir, Pimpinan. Saya selalu mengingatkan tentang, saya memiliki konsep PSP Pak, Pra, Saat dan Pasca Pak terkait pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah, terutama oleh Bapak-Bapak yang menduduki jabatan di Direktorat Jenderal bahwa, pra itu pentingnya proses sosialisasi terhadap masyarakat Pak dan kami dilibatkan sebagai representasi Dapil ya. Kalau ada masalah Pak, kami yang hampir 24 jam diakses, Pak.

Jadi pada saat pembangunan, pra pembangunan itu kami diakses tapi kemudian kami miliki, apa, tidak memiliki informasi yang jelas, jadi kami juga mohon di apa diberikan diberikan informasi ter-*update*.

Kemudian S nya saat, Pak. Saat pembangunan kami berharap masyarakat dilibatkan, walaupun misalnya dalam konteks proyek-proyek padat karya Pak yang non *skill* dan seterusnya, supaya apa, supaya mereka merasa bagian dari apa pemilik proyek ini sehingga mereka ada rasa kepedulian supaya proyek ini berjalan dengan lancar dan *on schedule*, Pak.

Terakhir pasca, Pak ya. Kenapa pasca, karena kenapa dalam konteks membangun kan ujung-ujungnya akhirnya apa, seperti pembangunan-pembangunan bendungan yang memiliki apa investasi besar Pak, itu akhirnya apa, berkembang menjadi destinasi-destinasi wisata dalam tanda petik ya atau ada pengembangan lain. *Nah*, pasca ini maksud kami masyarakat dilibatkan



*gitu*. Saya kira dari tim Bapak harus membuat kajian bagaimana setiap proyek itu memiliki nilai tambah sehingga ada peningkatan terhadap kualitas kehidupan masyarakat.

Terakhir Pak, saya itu selalu mengingatkan dalam 2-3 tahun terakhir katakanlah terkait nama-nama *project* yang diwakili dengan kata antara lain, Pak. *Nah*, itu antara lain itu saya kira harus dihilangkan Pak, *mending* di *breakdown* aja semua proyeknya, Pak ya. Kadang-kadang kami hanya baca loh kok proyek ini *ndak* ada *gitu*, kami bilang ke masyarakat *ndak* ada tapi ternyata ada proses di lapangan Pak, *oh* ternyata ada kata, ada dua kata antara lain ada di situ ternyata.

Saya kira di *breakdown* supaya kata antara lain itu di wilayah kami ada proyek atau *ndak gitu*. Kalau *ndak* ada kan kami juga bisa ngomong dengan gagah, Pak. Kalau sekarang kan kita ngomong, saya juga *nggak tau nih* ada atau *nggak* *gitu*, *nah*, padahal kita mitra Pak, *gitu*. Kalau mitra ya harusnya kita bersinergi.

Saya kira itu saja, Pimpinan. Mohon maaf dengan segala hormat, saya kadang-kadang tidak nyaman juga Pakde, karena tim ini kan Ketua orang-orang hebat *gitu kan*, tapi kan kami representasi Dapil yang harus berhadapan dengan masyarakat dan kami ingin *update* itu dan bisa mewakili mereka lagi. Itu kalau itu-itu *sih* skenario langit Bapak, terserah Allah saja.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih, Pak Mul.

Pak Bakri gak jadi? Ya udah. Pakde silakan, Pakde.

#### **F – PDIP (Ir. SUDJADI):**

Sebentar aja sama Pak Dirjen. Ini mohon maaf Pak Dirjen, jadi saya kritik halaman 15.

Air Baku Karangtalun itu ada di Dapil saya kecamatan luar, tapi sudah dibangun sejak tahun lalu untuk menyuplai orang-orang Jogja. *Nah*, orang *bekisar* itu jadi penonton, tolong Pak sebagian anggaran ini di apa disisihkan untuk membuat cek, cekdam di desa apa itu, di *anu* di desa salah satu desa luar yang DED-nya dua tahun lalu sudah ada itu.

Jadi, jangan sampai Komisi V-nya ada di sana yang subur makmur itu orang Jogja, ya memang Magelang *nggak* punya Raja, Jogja punya Raja, tapi kalau Komisi V itu *nggak* kenal raja, kenalnya hanya aspirasi. Kemudian, tadi cekdam bisa Pekunden, Pak. 2 tahun yang lalu DED-nya sudah.

Halaman 18, ini juga agak *nggak* ketemu nalar, Pak. Halaman 12 itu air baku untuk pengembangan KSPN Borobudur di Taman Kalasan. Taman Kalasan itu dekat Prambanan sana Pak, itu wilayah Sleman sebelah timur, padahal penyangga, KSPN Borobudur itu Wonosobo Temanggung, karena dia yang punya objek-objek yang memang nanti itu menjadi satu kesatuan dengan itu. *Nah*, paling tidak Pak, ya ini juga dipecah, Pak. Ini kan, kita kan, Dapil V itu bukan Dapil Jogja. Saya *nggak* tau ini kenapa ini *kok* disusun begini.

Lalu yang halaman 18, saya mohon embung yang saya usulkan itu Embung Tempak Pak bukan Embung Nggulem, Nggumelem. Embung Tempak itu Candi Mulyo, kalo Embung Nggumelem itu Pakis.

Jadi kira-kira itu Pak, tolong yang terlalu Jogja sentris itu, itu dananya dipecah untuk cekdam-cekdam, karena pertanian di sana itu banyak yang rusak karena lahar itu, Pak. Pak Dirjen, mohon ini Pak Direktur yang baru-baru diberi tau, jadi jangan sampai hanya Jogja sentris dan Anggota Komisi V yang ada itu di Dapil VI Jawa Tengah, Magelang, Wonosobo, Temanggung, Purworjo.

*Matur nuwun*, ini sekadar *anu* aja, *komen* sama permohonan itu aja. Jadi, jangan sekali-kali apa-apa Jogja, apa-apa Jogja, *wong* Jogja aja mau apa mau kunjungan kerja itu di *cancel kok nggak* jadi kok oleh Ketua, apa artinya ya *nggak* begitu penting lah.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih, Pakde.

Pak Irmawan. Iya Pak, Bapak namanya ada di sini kedaftar.

**F – PKB (H. IRMAWAN, S.Sos., M.M.):**

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Yang kami hormati Pimpinan,  
Bapak-Ibu Anggota Komisi V,  
Pak Dirjen,**

Saya mungkin sedikit saja ini, terutama ke Pak Dirjen Sumber Daya Air, Pak. Saya melihat dari rencana kegiatan Tahun 2023 ini pembangunan pengendali banjir 41 Kilometer. Tentu Bapak, Pak Dirjen juga sudah mengetahui kondisi Aceh seperti apa, tapi di sini belum nampak ada kegiatan pengendali banjir untuk Aceh Pak, yang sebelumnya pernah kita alokasikan pembangunan pengendali banjir di Sungai Krueng Singkil dan Sungai Krueng Alas. Saya berharap kalau memang memungkinkan anggaran di Tahun 2023

ini agar dapat ditampung lah untuk melanjutkan kegiatan yang sudah kita laksanakan sebelumnya.

Kemudian, pembangunan pengaman pantai 25 Kilometer yang terdiri dari beberapa provinsi, sementara kami juga kita usulkan kemarin ada di Meulaboh untuk melanjutkan kegiatan yang tahun sebelumnya ini juga masih masih belum tuntas, Pak. Jadi, saya berharap dari 25 Kilometer ini agar dapat kita tuntaskan apa namanya itu pengembangan pantai di Meulaboh tadi, agar kegiatan ini tidak mubadzir, Pak. Karena yang sudah kita laksanakan beberapa tahun terakhir sampai hari ini belum dapat maksimal kegunaanya karena belum tuntas kita laksanakan.

Selanjutnya, ada usulan dari masyarakat Aceh besar dan Kotamadya Banda Aceh, Pak. Ada pembangunan apa namanya ini pembangunan, sebentar Pak, saya bacakan. Bendungan Karet Krueng Aceh dibangun pada Tahun 2023 dengan lebar lebih kurang 80 Ribu, 80 Ribu Meter yang ditunjuk untuk mengatasi intrusi air laut yang mencapai lebih, lebih kurang 15 Kilometer ke arah darat, 15 Kilometer ke arah daratan Kota Banda Aceh dan Aceh Besar.

Bendungan Karet ini juga dimanfaatkan sebagai sumber air utama Kota Banda Aceh dan sebagai Kabupaten Aceh Besar, sebagian Kabupaten Aceh Besar, untuk kebutuhan air domestik, terutama air minum. Jadi, karena kondisi bendungan ini sekarang rusak parah sehingga terjadi krisis air bersih Pak, di Kotamadya Banda Aceh dan di sebagian Aceh Besar. Maka, saya berharap tahun ini bisa dialokasikan Pak pembangunannya, karena DED-nya sudah kita laksanakan. Kalau saya tidak salah di Tahun 2021 yang lalu juga dialokasikan dari Kementerian PUPR, dalam hal ini Dirjen Sumber Daya Air. Barangkali itu aja, Ketua.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih, Pak Irmawan.

Yang terakhir, cukup? Oh, *oke-oke* Pak Sudewo sudah? *Oke*, Pak Sudewo silakan. Pak Sudewo dulu, terus Pak Sumail dan Pak Syahrul.

**F – P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):**

*Bismillahirrahmanirrahim,  
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Langsung saja kepada Dirjen Pembiayaan Infrastruktur, Pak Herry TZ. Pembiayaan infrastruktur ini posisinya sangat strategis dalam mendukung kinerja Kementerian PUPR, tidak hanya masalah penyediaan perumahan tetapi yang KPBU-KPBU tadi ya, sumber pendanaan infrastruktur baik itu yang ada

di sumber daya air, bina marga, cipta karya maupun perumahan itu diproses, digodok di pembiayaan infrastruktur.

Maka pembiayaan infrastruktur itu sangat menentukan apakah kerjanya bisa mendukung Kementerian PUPR dalam hal meringankan APBN, dalam hal mempercepat terealisasinya infrastruktur tersebut itu atau justru malah sebaliknya, memberikan beban. Kalau pembiayaan infrastruktur tidak cermat dalam menentukan sebuah kebijakan, itu dampaknya sangat dirasa sekali bahwa infrastruktur strategis, program-program yang strategis itu menjadi terlambat realisasinya dan bisa juga menjadikan beban keuangan negara yang begitu besar.

Saya akan memberikan contoh bahwa akhir-akhir ini pembiayaan infrastruktur mengambil langkah yang sangat-sangat berbeda dengan sebelum-sebelumnya, yaitu dalam hal pembangunan, rencana pembangunan jalan tol, yang sumber pendanaannya adalah dari *loan*, dari hutang negara. Hutang negara itu bisa dari *G to G*, bisa juga dari Bank Dunia atau ADP, bisa juga dari swasta murni, ya, yang dikatakan kreditor swasta asing.

Terakhir, pembiayaan infrastruktur mengambil langkah bahwa *loan* dari Kreditor Swasta Asing (KSA). Kalau saya melihat KSA ini berpedoman pada peraturan Menteri Keuangan yang ditetapkan pada Tahun 2012. Dari 2012 sampai sekarang di Kementerian PUPR itu baru kali ini dicoba dengan model KSA, jadi 10 tahun berjalan Kementerian PUPR itu baru kali ini, yang sebelum-sebelumnya tidak pernah.

Sumber pendanaan hutang ini dari KSA itu, apakah lembaga keuangan di luar negeri atau apakah lembaga keuangan di dalam negeri ya. Ada apa 10 tahun berjalan ini peraturan Menteri Keuangan tersebut dengan model KSA tidak pernah dilaksanakan, padahal di zaman pemerintahan sebelumnya juga ini pernah dicoba tapi juga tidak berjalan, juga gagal. Berarti memang ada sesuatu yang perlu kita cermati, yang perlu kita evaluasi dengan model KSA ini gitu ya.

Tapi, ketika Pak Herry TZ menjadi Dirjen Pembiayaan Infrastruktur mengambil langkah ini. Saya apresiasi, saya *nggak* menyalahkan begitukan, karena namanya ikhtiar itu untuk mencari supaya beban bunga tidak tinggi ya, kemudian prosesnya cepat itu perlu dilakukan, perlu dicoba.

Kalau hutang luar negeri untuk membiayai infrastruktur yang selama ini berjalan dari pinjaman negara tertentu sudah biasa dilakukan dan bisa diketahui kelebihan dan kekurangannya, tapi dengan model kreditor swasta asing memang belum pernah dilakukan, maka kalau kali ini dicoba oleh Dirjen Pembiayaan Infrastruktur tidak ada salahnya. Hanya yang ingin perlu mendapatkan satu penjelasan dari Dirjen Pembiayaan Infrastruktur apakah menentukan pilihan dengan model KSA ini betul-betul segala sesuatunya sudah dibandingkan dengan *G to G* dari negara tertentu, karena bisa *G to G* itu dari negara A atau negara B atau negara C dan seterusnya, apakah bunganya memang lebih rendah, model bunganya apakah *floating* atau *fix*, ya, kalau memang itu *G to G* itu pakai pedoman dollar mata uang negara tersebut apakah

dollar, bagaimana supaya tidak terjadi fluktuasi, pelemahan rupiah pada kurun waktu tertentu, ya, kemudian jadi blok untuk sekian tahun dan segala macam itu diperhitungkan dan apakah prosesnya itu menjadi lebih cepat dibandingkan dengan *G to G* ataukah tidak begitukan.

Kalau itu misalnya dari lembaga keuangan dalam negeri dengan model sindikasi ya kan bisa saja itu menguntungkan-menguntungkan negara, dalam hal ini membantu Kementerian Keuangan yang harusnya bunganya tinggi tapi model sindikasi bunga menjadi lebih rendah, yang harusnya ada jaminan menjadi tidak ada jaminan model seperti itu karena juga untuk membantu Pemerintah.

Maka oleh Dirjen Pembiayaan Infrastruktur tolong dijelaskan kepada kami, jangan sampai di kemudian hari apa yang dipilih dari Dirjen Pembiayaan Infrastruktur dengan model yang tidak biasanya ini dilakukan ya kan, nanti jangan-jangan di kemudian hari ternyata menjadi *blunder gitukan*. Baru ketahuan di kemudian hari bahwa peminat dari satu lembaga keuangan yang akan memberikan pinjaman itu bunganya lebih tinggi daripada *G to G*, prosesnya lebih lama daripada *G to G*, sementara sesuatu program yang dikehendaki itu harus segera terealisasi ada target waktu realisian.

Dengan Program Opor yang di, yang dicanangkan oleh Pak Menteri PUPR itu kan menjadi sebuah pedoman bahwa jangan sampai pasca 2024 ada satu pekerjaan besar yang tidak tuntas kemudian pergantian satu rezim situasi politiknya berbeda ini menjadi tidak jelas, itu yang diantisipasi tapi jangan sampai pilihan kebijakan yang dilakukan oleh pembiayaan infrastruktur justru tidak sejalan dengan hal ini, *gitu*. Jadi, saya hanya mengingatkan saja, saya tidak ada, tidak ada masalah dengan pilihan itu, tidak mempersoalkan, tidak mempermasalahakan, memang sesuatu yang perlu dicoba itu kita dukung supaya yang terpenting adalah mendapatkan sesuatu yang terbaik.

Kemudian juga KPBU, ya. Dengan model KPBU inilah yang memang yang paling kita inginkan, idealnya seperti itu. Di mana, penyediaan infrastruktur kalau bisa dikerjakan oleh pihak ketiga, uangnya dari investor, uangnya dari investor, tapi jangan sampai salah memilih investor untuk proyek tertentu ya. Investor, saya *nggak* tahu regulasinya dalam menentukan investor, pelelangan investor itu ya kan, apakah hanya investor kita lihat pada saat dia menyeter sekian persen dari apa yang dipersyaratkan sekian yang harus dipersyaratkan ataukah kita lihat pembukuan investor itu. Kita lihat suatu usaha atau perusahaan tersebut itu benar-benar sehat itu kita lihat dari dia hanya bisa setor ataukah kita lihat dalam pembukuannya perusahaan tersebut misalnya satu tahun terakhir.

Saya juga tahu, ada ruas jalan tol tertentu yang sampai sekarang itu tidak jelas padahal itu sudah 2019, sudah dua tahun lebih, itu ditetapkan investornya bahkan sudah ditetapkan kontruksi, kontruksinya, pelelangan kontruksinya tapi itu tidak berjalan dan itu terjadi juga di ruas jalan tol yang lain ini kan sesuatu yang aneh *gitu ya, gituloh*, misalnya jalan tol Solo – Jogja.

Sesuatu yang terjadi di situ, itu sesuatu yang sangat tidak kita harapkan, tetapi juga terjadi di ruas jalan tol yang lain. Maka, Dirjen pembiayaan infrastruktur harus cermat terhadap hal ini ya, jangan sampai ada ruas-ruas jalan tol atau model-model KPBU yang hanya abal-abal, yang hanya abal-abal. Ketika itu sudah ditetapkan sebagai pemegang konsesi ya, sebagai investor ternyata dia tidak punya uang, ini kayak kejadian jalan tol yang di Kayu Agung-Palembang ya, itu sekarang menjadi satu persoalan. Jalan tolnya sudah selesai, sudah operasional, tapi persoalannya di situ belum selesai. Karena juga Pemerintah dalam ini Kementerian PUPR salah menunjuk investor, ternyata investor tersebut tidak punya uang ya, kemudian dikerjakan baru sekian 5% langsung itu dijual dengan harga yang sangat fantastis, tiga kali lipatnya itu. Ini sampai sekarang menjadi satu persoalan.

Di jalan tol Mengwi, Mengwi mana itu yang di Bali, itu juga indikasinya seperti itu. Jadi jangan sampai kita tunjuk investor yang abal-abal. Kalau untuk kontruksinya semuanya siap, ini KPBU ini *godokannya* Pak Herry TZ ini, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur, termasuk juga beban Pemerintah Kementerian PUPR untuk menyediakan perumahan yang sekian ratus ribu itu 280.000, itu bagaimana strategi dan kebijakannya untuk merealisasikannya.

Sementara kita lihat untuk mencapai hal itu, itu di daerah-daerah sulit sekali mencari lahan yang strategis tapi dengan harga tanah yang murah, itu sulit sekali, sulit sekali. *Nah*, bagaimana ini strategi dan kebijakannya untuk bisa merealisasikan itu, termasuk juga seperti SPAM itu KPBU. SPAM KPBU itu sebenarnya menarik, tetapi yang menjadi tidak menarik itu kan jaminan untuk mengembalikan uang investasinya itu dari mana itu. Kalau dari warga yang menggunakan air, rasanya investor tidak mau, tidak tertarik, karena banyak persoalan terjadi di sana, tetapi kalau Pemerintah Daerah mau menjamin untuk membayarnya, itu mungkin mempermudah investor untuk tertarik di SPAM, tapi, SPAM yang mana ini daerah,

#### **KETUA RAPAT:**

Dipersingkat Pak, dipersingkat.

#### **F – P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):**

Siap.

Pemerintah Daerah yang mana yang sudah seperti itu, jadi jangan sampai ini hanya menjadi sebuah wacana tetapi tidak dikonkritkan oleh pembiayaan infrastruktur.

Soal KPBU yang terakhir, yang KPBU yang terakhir. Jalan tol Demak - Tuban itu bagaimana kelanjutannya, ini *backbone* ini, *backbone* ekonomi di Pulau Jawa, ya. Harusnya sudah direalisasikan jauh sebelum jalan tol Semarang-Solo, Solo-Mojokerto harusnya di jalan tol ini dulu yang harus direalisasikan, tapi sampai sekarang kan belum terealisasi. Dulu Tahun 2021 saya tanya sama bina marga dan pembiayaan infrastruktur katanya sedang di studi, selesai kira-kira awal Tahun 2022, awal 2022 saya tanyakan katanya

studinya akan selesai di pertengahan 2022, ini sudah pertengahan, maka saya harus tanyakan.

Yang terakhir kepada Dirjen Sumber Daya Air. Kita berbicara dalam konteks nasional. Kalau soal daerah pemilihan *clear* Pak Jarot, Pak Bob ini terima kasih ini ya, dengan Bendung Karet di Sungai Juwana itu memang sangat didambakan bukan menjadi sebuah kebanggaan, Pak, itu bukan monumental, tapi memang mengatasi suatu persoalan yang sangat mendasar, supaya tidak terjadi *intrusi*, sungai apa itu air laut ke sungai.

Akibat dari kejadian alam seperti itu masuknya air laut ke Sungai Juwana, mungkin yang sudah terjadi ribuan tahun atau jutaan tahun selama ini, itu sampai pada radius kira-kira 20 Kilometer dari Sungai Juwana aja sumber mata airnya asin, tapi dengan kegiatan atau program Bendung Karet di Sungai Juwana ini yang merupakan torehan sejarah dari Pak Menteri PUPR, dari Pak Jarot sebagai Dirjen SDA dan juga dari Pak Bob itu akan mengatasi persoalan yang sekian ribuan tahun atau ratusan ribu tahun itu terjadi, lambat laun sumber mata air yang asin akan menjadi hilang, jadi persoalan Dapil *clear* saya terima kasih, saya akan berbicara dalam konteks nasional.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019, Pak, tentang Sumber Daya Air, yang ditetapkan ya, pada tahun sekitar Oktober 2019 sampai dengan sekarang itu belum jelas implementasinya, pelaksanaannya, apakah sudah ada peraturan di bawahnya yang sudah dibuat oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, apakah itu berupa Peraturan Pemerintah, apakah itu Peraturan Menteri, sekadar Peraturan Menteri belum ada kabar juga.

Sementara kalau saya lihat secara rinci, saya cermati, dari Undang-Undang tentang Sumber Daya Air ini sangat bagus sekali Pak, reformatif sekali dan visioner sekali, sangat membantu untuk masyarakat dan Pemerintah. Jadi, akan lebih baik kalau itu diperhatikan oleh Direktorat Sumber Daya Air untuk segera diimplementasikan, saya mengingatkan itu.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum,*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,*

Ya betul Pak Dirjen, Undang-Undang SDA 2019 itu sampai sekarang ini belum ada pelaksanaan aturan turunannya. Selanjutnya, Pak Sumail, siap-siap Pak, Pak.

**F – P. GERINDRA (Ir. SUMAIL ABDULLAH):**

Terima kasih, Pimpinan. Ada tambahan lagi? Langsung ya, ya.

Pak Dirjen, saya langsung ke Dirjen SDA saja. Tadi melalui *online* saya mengikuti rapat agak terlambat bahwa disebut ada Waduk Sampean yang hulunya ada di Desa Tapen, Bondowoso.

Kami senang mendengar warga juga tentu antusias bahwa bakal ada revitalisasi terhadap waduk itu. Akan tetapi, selain kaitannya dengan peningkatan kapasitas air, bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, Pak masyarakat yang teraliri Waduk Sampean ini mengeluh tentang kualitas air yang bercampur belerang.

Jadi, aspirasi dari mereka sedapat mungkin dari pihak Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air agar ada *treatment* sebelum air itu dialirkan masuk ke jaringan-jaringan irigasi, yang di Situbondo itu mengairi di empat kecamatan sawah, Pak, karena bukan hanya digunakan untuk pengairan di sana untuk MCK juga, mandi cuci dari kepentingan-kepentingan rumah tangga agar kualitas air ini bisa sama, artinya air yang diterima itu bisa sama dengan kabupaten-kabupaten lain yang tidak bercampur dengan belerang karena sangat mengganggu kesehatan, di samping itu juga berdampak negatif terhadap kesuburan tanah.

Saya pernah menyebutkan bahwa, dalam satu tahun hanya bisa ditanami satu komoditi saja yakni tebu. Kalau ditanami padi sudah dan palawija sudah tidak apa namanya bisa berproduksi dengan baik.

Yang ke dua, Pak Dirjen, kaitannya dengan pembangunan penahan pantai. Saya tidak mendengar ada di wilayah tadi, mungkin masuk di antara lain itu. Akan tetapi saya menekankan bahwa, kebutuhannya sangat mendesak, pengaman pantai di Desa Sumberejo, Dusun Sukorejo yang berdampingan dengan pondok pesantren besar di sana, Salafiyah Syafi'iyah ya, Pak Ketua sering ke sana nampaknya, Pak Syaiful Tamliha, itu ada aspirasi dari pesantrennya, Pak, agar tidak membahayakan apa namanya para santri di sana.

Yang ke dua, pengaman pantai di desa Bomo, kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi. Itu masuk desa wisata yang sudah terbangun vila-vila di sekitarnya terancam keberadaannya karena abrasi.

Saya kira dua penting itu dan pada kesempatan kali ini juga Pimpinan mungkin nanti segera mungkin kita diagendakan dapat internal, supaya tidak lupa makanya saya ingatkan.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,*



Rapat Internal ya, Pak. Oh gitu. Selanjutnya Pak Syahrul Aidi.

**F – PKS (H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, L.c., M.A.):**

Terima kasih, Pimpinan.

**Pimpinan dan Anggota Komisi V yang saya hormati,  
Pak Dirjen beserta jajarannya,**

Mohon maaf terlambat, saya baru datang sampai dari Dapil *nih*, Pak. Karena merasa sangat pentingnya kehadiran saya di, saya sangat penting untuk hadir pada rapat kali ini karena aspirasi masyarakat, terutama terkait dengan pengaman pantai dan turap tebing sungai, Pak.

Pak Dirjen, yang pertama adalah pengaman pantai. *Alhamdulillah* program dari SDA ini untuk pengaman pantai, khusus pulau terluar itu berjalan, hanya saja karena ini dukungannya dari SBSN katanya. Kami mohon pertimbangan agar juga untuk pengaman pantai di pulau Indragiri Hilir. Saya sudah WA Pak Dirjen, pertimbangannya bahwasanya Indragiri Hilir ini adalah daerah penghasil kelapa, pusat kelapa Indonesia ya, menyumbang produksi kelapa di Indonesia ini sangat besar dan setiap tahun ratusan hektar tanah mereka ini, kebun kelapa itu harus tenggelam ke laut, Pak, ada yang gagal panen dan Pak, Pak Dirjen sudah melihat beberapa fotonya.

*Nah*, mohon ini supaya lebih pasti anggarannya, Pak, dianggarkan juga dengan dana SBSN, Pak. Salah satu contoh kemarin di Kuala, Desa Kuala Selat, Desa Kuala Selat di Kabupaten Indragiri Hilir dan juga ada di Guntung, ada di Teluk Belengkong dan Pulau Burung, Pak. Mudah-mudahan bisa terbangun pada Tahun 2023.

Kemudian, untuk Turat Tebing sungai. Pada pertemuan kita dengan Pak Menteri kemarin sudah saya sampaikan bahwasanya, empat sungai yang menjadi kewenangan BWS 3, itu yang panjangnya itu berada di Riau. Hulunya memang di Sumatera Barat, tetapi sungai ini sangat panjang dan itu kiri kanannya adalah masyarakat itu beradanya di daerah Riau.

Tahun kemarin, Pak hanya kalau tidak salah 4-5 titik saja kita mendapatkan program pengaman tebing ini, padahal kasusnya lebih seratus kasus yang mengancam jalan, mengancam sekolah, mengancam masjid, yang mengancam pekuburan, yang mengancam rumah warga, banyak sekali, Pak. Kita *press-press* kemarin sudah tadinya tujuh akhirnya menjadi empat atau lima kalau *ndak* salah. Itu mohon-mohon juga (suara kurang jelas) bagaimana mereka bisa masukkan apa yang menjadi kebutuhan mereka.

Saya mohon di 2023 ini Pak, mohon dibuatkan formatnya, perhitungannya, daerah yang memang panjang sungainya itu sangat panjang janganlah dibuat hanya 4-5 titik, karena saya malu, Pak. Beberapa daerah, Kepala Daerah mengadu kepada saya “Kami tidak bisa bangun, Pak Syahrul,” katanya. *Nah*, memang uangnya juga mereka tidak ada, ini kan kewenangan

pusat, kewenangan pusat. Komisi V ya malu juga kalau hanya 1-2 titik setiap tahun di daerah tersebut, sementara kebutuhan mereka sangat panjang.

*Nah*, memang kita memang perlu harus mencari pola agar pembangunan Turap Tebing ini tidak hanya sekedar untuk pengaman pantai, tetapi juga bagaimana membentuk tempat-tempat wisata bagi masyarakat ke depannya. Jadi, pola ini yang barangkali duit yang kita gunakan untuk membangun pantai memberikan, membangun sungai, turap tebing sungai ini itu bisa memberikan *Multiplier effect* ketika itu dijadikan pusat destinasi wisata nantinya.

Terima kasih, Pak. Saya ada. Ketua, sekarang bisa ya?

#### **KETUA RAPAT:**

Ya, Silakan, Pak Syahrul. Yang mau menyerahkan usulan silakan Pak sekalian, Bapak-Ibu. Bang Dedi, silakan. Foto-foto. Sudah lengkap ya.

Pak Dirjen ini, Pak Dedi ini lagi ulang tahun Pak jadi usulannya harus dioptimalkan. Secara maksimal usulannya Pak Dedi.

Selanjutnya, saya persilakan ke Ibu Novita, siap-siap Pak Harvey Malaihollo.

#### **F – P. GERINDRA (Hj. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M.):**

Terima kasih, Pimpinan.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Yang saya hormati Pimpinan,  
Anggota,  
Pak Dirjen semuanya dan jajaran yang hadir fisik maupun virtual,**

Langsung saja, ya yang pasti tadi sudah bertemu, kemudian sudah diskusi. Kita tahu, saya secara pribadi tahu bahwa anggarannya tadi sangat terbatas tetapi harus mengurus seluruh permasalahan yang ada di Indonesia dan kita juga harus memperjuangkan Dapil-Dapil, tetapi saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada Pak Jarot dan jajaran karena sudah berkoordinasi dengan maksimal sampai bawah selama ini *gitu* ya.

Dan, tadi saya lihat di 2023 ada beberapa poin yang kebetulan ada di Dapil saya, paling Pak Jarot nanti saya akan berkoordinasi secara langsung dengan jajaran di bawah Pak Jarot, sehingga titik yang turun nanti tidak salah mana yang aspirasi saya, yang mana Banyumas Cilacap supaya tidak meleset *gitu*, mungkin nanti Pak Jarot bisa menyampaikan juga kepada jajarannya.

Kemudian, pastinya sekali lagi terima kasih karena permasalahan-permasalahan yang ada Dapil saya beberapa sudah ada solusi walaupun pastinya tidak semuanya dan kemudian pesan saya *sih* Pak, kemarin

berharapnya itu para pemenang bisa mengakomodir para pengusaha yang ada di lokal *gitu*, itu aja itu.

Kemudian, program-program berikutnya pastinya saya *sih* tidak ada kendala untuk koordinasi Pak Jarot, karena Pak Jarot juga sangat responsif *gitu* kalau di WA bisa tidak bisa selalu menyampaikan dan kita. Semuanya kayaknya saya dengar semuanya, iya biar cepat, biar cepat, *nggak* pakai lama *nih*. Ini, pujian terus minta masalahnya ya. Kemudian, tadi sudah Pak Jarot, nanti kita koordinasi secara langsung.

Kemudian Pak Herry. Kepada Pak Herry saya ingin tanya yang jalan tol Cilacap-Jogja Pak dan beberapa itu, program Cilacap itu *gimana* prosesnya, kemudian berapa anggarannya dan saya ingin mendengarkan yang Cilacap-Jogja dan berikutnya yang lainnya yang berkenaan dengan Dapil saya.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Cepet kan.

**KETUA RAPAT:**

Cepet Ibu, terima kasih Ibu.

**F – P. GERINDRA (Hj. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M.):**

Cepet dan pendek.

**KETUA RAPAT:**

Ya, yang WA-nya cepat dibalas, kalau kita *agak* lambat teman-teman, saya *nggak tau* Pak Dirjen kayaknya pilih kasih Pak Dirjen. Selanjutnya Pak Harvey, selanjutnya siap-siap yang terakhir Ibu Cen Sui Lan.

**F – PDIP (HARVEY B. MALAIHOLLO):**

Terima kasih.

**Pimpinan dan Anggota Komisi V yang saya hormati, juga Pak Dirjen, Bapak-Bapak Dirjen beserta jajarannya yang saya banggakan,**

Kepada Pak Dirjen Sumber Daya Air, khususnya Pak Jarot, kesempatan kali ini saya akan sampaikan aspirasi dari Dapil saya, Papua Barat, serta dari Balai Wilayah Sungai Papua Barat.

Terkait pengendalian banjir di Sungai Andai di Kabupaten Manokwari, juga pengendalian banjir Sungai Warrior di Kabupaten Manokwari, pengendalian banjir di Sungai Hebron, Kabupaten Maybrat, serta

pembangunan pengaman Pantai Sausapor di Kabupaten Tambrauw. Ini sangat penting bagi kami agar segera diberikan solusi terkait permasalahan yang sangat kompleks untuk daerah Papua Barat. Mohon perhatiannya, Pak Jarot. Terima kasih, itu saja Pimpinan.

Terima kasih banyak.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih, Pak Harvey.

Selanjutnya, Ibu Cen Sui Lan.

**F – P. GOLKAR (CEN SUI LAN):**

Terima kasih, Pimpinan.  
Yang saya hormati,

**KETUA RAPAT :**

Jangan lupa kiriman durennya.

**F – P. GOLKAR (CEN SUI LAN):**

**Yang saya hormati Pimpinan dan teman-teman Komisi V,  
Yang saya hormati Pak Dirjen SDA dan Pak Dirjen Herry,**

Saya langsung *aja*, Pak Dir, Pak Herry, saya kemarin bertemu dengan Pak Gubernur membicarakan mengenai jembatan Batam-Bintan. Jadi, saya dititipkan pesan mengenai keberatan dari Pemprov mengenai penambahan anggaran biaya yang harus dilengkapi sebesar 50 Miliar untuk melengkapi studi DED kalau *nggak* salah, padahal sebenarnya itu sudah disepakati itu adalah bagian dari Pemerintah Pusat, tiba-tiba disuruh agar Pemerintah Daerah yang mengambil alih. Jadi, tolong Pak Dirjen tolong dibantu, karena saat ini terus terang Pemprov itu anggarannya belum, belum-belum memadai.

Kemarin saya ada bicara juga dengan Pak Dirjen Bina Marga tapi belum ada titik temu. Tolong nanti Pak Dirjen bantu agar Batam – Bintan ini bisa tetap berjalan *on the track*. Jadi tolong dibantu, Pak Dirjen, itu aja.

Pak Dirjen, Pak Jarot, terima kasih sekali karena kemarin ada kejadian tanah longsor di Jalan Teluk DP Desa Sabang Mawang di Natuna, Kabupaten Natuna. Saya WA tanggal 2 langsung ditindaklanjuti dan saya sudah mendapat beritanya dari, Pak, Bu Kabalai, Bu Tuti.

Yang saya ingin sampaikan, kita kan sudah *tau*, saya minta dibantu agar ada tindak lanjut, agar ada tindak lanjut bagaimana mengatasi hal itu. Karena itu kan di, di pantai ya, jadi itu longsor itu memang berbahaya sekali. Jadi tolong Pak Jarot nanti ditindaklanjuti seperti apa, saya tunggu terima kasih sekali sudah langsung mengatasinya. Terima kasih, Pak Jarot ya.

Demikian dari saya Pimpinan, itu saja sekian.

**KETUA RAPAT:**

Baik, Bu Cen Sui Lan. Jangan lupa kiriman durennya ke Pak Jarot, biar konkret itu. Selanjutnya terakhir ada Pak Aras, silakan.

**F – PAN (H. A. BAKRI HM., S.E.):**

Pak Ketua, saya juga mau kalau *gitulah*, Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Oke, oke, oke.

**F – PPP (Dr. H. MUH. ARAS, S.Pd., M.M.):**

Terima kasih, Pak Ketua.

Durennya juga, bertanya juga. Nanti diserahkan sama Pakde *gimana* keputusannya.

Terima kasih, Pak Ketua.

*Bismillahirrahmanirrahim,  
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Yang terhormat Pimpinan dan kawan-kawan Anggota Komisi V,  
Yang saya hormati Pak Dirjen SDA dan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur,  
dan Seluruh jajaran yang saya hormati,**

Pertama-tama, kami mengapresiasi tentang kinerja yang sampai saat ini luar biasa dari ke dua Dirjen kita, pencapaian sampai di bulan Juni. Mudah-mudahan bisa menyelesaikan sampai akhir tahun dengan capaian melebihi dari tahun kemarin.

Yang ke dua, ucapan terima kasih program-program dari SDA yang cukup menyentuh masyarakat, terutama masyarakat bawah sehingga betul betul sangat membantu dalam kami mengkomunikasikan terkait dengan beberapa kepentingan-kepentingan pusat sampai kepada daerah. Paling tidak bahwa, di masa pandemi ini program-program dari PUPR betul-betul bisa memberikan solusi bagi masyarakat di bawah.

Kemudian yang selanjutnya, kebetulan pada minggu yang lalu saya diminta untuk menerima kawan-kawan dari DPRD Kabupaten Barru sebanyak 18 orang untuk menyampaikan aspirasinya di Komisi V. Salah satu yang disampaikan oleh mereka adalah di Kabupaten Barru itu hampir setiap saat terjadi banjir di Desa Bojo dan Kelurahan Bojo Barru di Kecamatan Mallusetasi di Kabupaten Barru dan di tempat itu juga setiap tahun, karena ini berbatasan

langsung dengan laut Sulawesi, Selat Makassar sehingga gelombang atau ombak itu sangat besar sehingga membuat abrasi.

*Nah*, perlu ada antisipasi sehingga tidak membahayakan masyarakat dan jalan nasional yang ada di sana, sehingga dibutuhkan untuk penanganan yang serius dari Kementerian PUPR untuk mencegah terjadinya abrasi, barangkali seperti itu.

Yang ke dua, sekaligus mengingatkan Pak Dirjen. Dua minggu yang lalu juga kami bersama dengan Pak Ketua, berkunjung ke Kabupaten Pangkep juga terkait dengan banjir juga di Kota Pangkep itu yang diakibatkan oleh Bendung Tabo-Tabo ini yang tidak kunjung terselesaikan, ya mudah-mudahan ada atensi yang baik dari Pak Dirjen sehingga ini bisa diprogramkan kembali dan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat yang ada di sana.

Yang ke dua adalah pengurusan DAS Pangkajene. *Nah*, ini juga menjadi masukkan Pak Bupati dan saya sampaikan kepada Kepala Balai mudah-mudahan ini menjadi perhatian sehingga di tahun-tahun mendatang sudah bisa terselesaikan dengan baik.

Dan yang terakhir, ya kami juga menyampaikan terima kasih bahwa, komunikasi yang baik dengan teman-teman di balai dan jajarannya, ini memberikan semangat bagi kami juga untuk terus berjuang untuk memberikan nilai manfaat kepada seluruh masyarakat. Barangkali begitu, Pak Ketua.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Baik, Pak. Selanjutnya, sebentar Pak Dedi ya, sebentar Pak Dedi, Pak Bakri dulu, setelah Pak Bakri, Pak Dedi.

#### **F – PAN (H. A. BAKRI HM., S.E.):**

Ya. Makasih, Pak Ketua.

**Pak TZ sama Pak Jarot, serta  
Seluruh jajarannya,  
Pak Dirjen yang saya hormati,  
Anggota Komisi V,**

Tadi, sebenarnya saya duluan bicara itu tidak *pingin* berpanjang tapi ternyata saya dengar kawan asik-asik juga bicara ke mana-mana. Oleh sebab itu saya coba menyampaikan singkat *aja* mungkin.

Ke Pak Dirjen Pembiayaan ini, ini kita cerita sedikit Pak, ini. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kadang-kadang menjadi prioritas di Kementerian PUPR, itu yang terkadang-kadang pembiayaannya sangat sulit. Oleh sebab itu,

saya merasakan selama hampir 13 tahun di Komisi V itu merasakan, Pak, contoh di sumber daya air.

Di sumber daya air itu mungkin sudah hampir 10 tahun bicara tentang penanggulangan banjir Kota Jambi, yang itu setiap tahun, setiap saat ribut terus Pak di Jambi itu. Dulu kalau hujan sebentar langsung kering, sekarang sebentar aja hujan banjir, di mana-mana. *Nah*, sementara di lain sisi saya lihat pembiayaan infrastruktur ini membiayai kegiatan-kegiatan yang besar ya, contoh, Bapak mau membiayai Bendungan Merangin. Oke, oke aja, saya setuju. Coba dipikirkan kegiatan-kegiatan yang kecil tapi sangat dirasakan, Pak.

Contoh juga di Kementerian PUPR di Cipta Karya itu. Ada hari ini dipertontonkan itu program cipta karya itu IPAL, Limbah, anggarannya ratusan miliar, orang pun bingung bicara IPAL di Jambi, sementara *kok* banjir *kok* tidak diurus, setiap saat dirasakan.

*Nah*, yang *begini-gini* mungkin perlu menjadi perhatian ya Pak ya, menjadi perhatian. Karena banjir itu dirasakan betul Pak, kalau IPAL saya pikir terlambat 5-6 tahun juga *nggak* apa-apa, tapi karena di situ ada kita bikin apa namanya pintu air yang anggarannya *nggak* sedikit dan orang selalu bertanya ke saya, kapan Pak Bakri ini difungsikan maksimal, saya bilang belum karena harus ada aliran dana saya dari dalam keluar.

*Nah*, yang *begini gini* mungkin perlu dipertimbangkan Pak TZ, ya. Jadi, jangan sampai kita memprogram sesuatu yang jarak apa istilahnya programnya Pak, lama, tapi yang dirasakan hari ini tidak diprogramkan di kegiatannya. Ya saya merasakan ini, saya minta tolong program penanggulangan banjir ini kalau bisa dimasukkan APBN, tapi Kementerian bilang *loan, loan, nah loan* itu panjang sekali Pak, sampai 10 tahun *loan* juga, *nah* sementara banjir ini makin itu. Itu mungkin yang perlu menjadi perhatian di Pak TZ.

Terus yang ke dua, Pak Jarot terima kasih, saya dua hari yang lalu datang ke, ke satu kabupaten yaitu Kabupaten Tebo itu ada longsor, Pak, longsor. Sebenarnya hari itu saya, acara saya padat tapi Pak Bupati sangat mendesak dan sampai di lokasi saya didatangi orang masyarakat banyak sekali Pak, karena longsor ini itu kalau terjadi jalan itu putus dan masyarakat ini tergusur ini bisa berakibat terhadap lima kecamatan, yaitu posisinya di Desa Pundi Kalo, pinggiran Sungai Batanghari.

Ini saya pikir sangat mendesak Pak Dirjen, karena saya bilang sangat mendesak karena memang semua masyarakat bicara kemarin di sana "Tolong Pak Bakri, tolong Pak Bupati ini bisa direalisasikan." Itu aja mungkin yang bagi saya, yang lain-lain tadi sudah saya serahkan secara tertulis, harapan saya sih kita tidak perlu bicara karena bisa cepat selesai, tapi kawan-kawan bicara membuat nafsu saya juga *pingin* bicara tadi akhirnya.

Oleh sebab itu mohon menjadi perhatian Pak TZ satu itu masalah pembiayaan, yang ke dua tadi masalah penanggulangan tebing itu di Desa Pundi Kalo, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih, Pak Bakri.

Sayang Pak, kalau Bapak *nggak* bicara hari ini pakai jas ganteng-ganteng *gitu*, ya. Yang terakhir, yang terakhir ya, Pak Dedi.

**F – PKB (H. DEDI WAHIDI, S.Pd.):**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Pimpinan Komisi V beserta seluruh rekan-rekan Komisi V yang saya hormati,  
Pak Dirjen SDA dan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur beserta seluruh jajaran yang saya hormati,**

Pertama, saya menyampaikan terima kasih Pak Dirjen SDA sudah memenuhi usulan saya untuk pembangunan penahan ombak, karena daerah Dapil saya Indramayu panjang pantainya 147, banyak titik-titik yang rawan abrasi, lalu kemudian saya usul dan dipenuhi di beberapa titik tapi ada beberapa titik yang belum selesai, mohon program lanjutannya Pak Dirjen, baik penahan ombak maupun penahan rob di Eretan.

Kemudian, ada embung Pak Dirjen yang saya mohon tadi sudah masuk usulan tertulis, itu belum ada salurannya.

Yang terakhir, karena usulannya banyak tapi sudah saya serahkan dalam bentuk tertulis, yang ini saja Pak, karena Indramayu, Cirebon, daerah pemilihan saya itu daerah pantai utara, yakni ya dari sisi kondisi sungai adalah daerah hilir sehingga terus-menerus terjadi sedimentasi pendangkalan sungai.

Oleh karenanya, maka perlu rutin adanya pemeliharaan atau pengurusan, sehingga untuk itu selama ini saya sangat baik kerja sama dengan balai, baik Kepala Balai Citarum maupun Kepala Balai Cimanuk, Cisang Garung, tapi tidak semua usulan bisa segera dipenuhi karena keterbatasan anggaran dan itu sekedar pengurusan-pengurusan sungai saja Pak Dirjen, saya mohon kiranya bisa dinaikkan untuk anggaran OP, Pak ya. Biaya operasional di balai Pak, sehingga untuk nguras-nguras saja alatnya ada tapi biaya operasionalnya saya *nggak* ada.

Saya kira demikian saja, Pak Ketua.

Terima kasih.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq,*



*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,*  
**Bapak-Ibu sekalian,**

Dari Anggota Komisi V sudah selesai, selanjutnya ke meja Pimpinan dan untuk kesempatan pertama saya persilakan kepada Bapak Kyai Syaiful Tamliha.

**F – PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., M.S.) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Ini Pak Sumail sama Pak Andi Iwan ini arahannya kalau urusan istri ke saya, Kyai itu baru bisa disebut Kyai kalau istrinya lebih dari satu.

Pak Dirjen Sumber Daya Air, di Dapil saya itu ada irigasi yang dibangun oleh Belanda, bagus sekali. Pada kunjungan reses Komisi V kemarin saya meninjau ke sana, ternyata pintu-pintunya itu sudah tidak berfungsi, sehingga kalau air sungai sedang melimpah itu *loss* saja dia masuk, kemudian ketika petani mau panen kekeringan dan itu banyak sekali puluhan ribu hektar yang semestinya bisa dimanfaatkan. Satu kecamatan aja bisa sampai 2.000 Hektar.

Saya sudah meninjau ke sana, dan saya memohon Pak Dirjen bisa ke sana untuk melihat potensi pencetakan sawah. Sekarang kan mencetak 25.000 setahun aja susah, ini memelihara yang punya Belanda *kagak* bisa. Sudah 76 tahun kita merdeka tapi *nggak* ada dari Pemerintahan berikutnya itu yang memperhatikan soal ini. Kalau bisa panen dua kali setahun aja itu luar biasa, Pak Dirjen. Jadi, saya berharap apakah Pak Dirjen atau Pak Direktur nantinya untuk bisa menjaga itu, supaya segera dikerjakan dan itu *nggak* mahal kok kayaknya.

Kemudian ke dua, Bendungan Riam Kiwa. Baik Pak Dirjen Pembiayaan Infrastruktur maupun Sumber Daya Air saya lihat di paparannya sama sekali tidak menyinggung-nyinggung tentang Bendungan Riam Kanan, Riam Kiwa di Kalimantan Selatan. Saya harap segerakan peletakan batu pertama.

Kalau prosesi antar Kementerian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saya pikir itu tidak terlalu memerlukan waktu yang lama daripada banjir terus di tiga, di tiga kabupaten dan itu merugikan masyarakat maupun negara, karena akibat banjir dari Riam Kiwa itu air yang tidak terbendung, akibatnya tiga kabupaten bisa tenggelam. Saya harap ini bisa diprioritaskan.

Yang ketiga, abrasi di Jembrana. Saya ke Jembrana acara kegiatan di luar komisi, *kok* tiba-tiba di sana terjadi abrasi yang luar biasa. Menurut saya ini perlu ditangani segera.

Dan yang terakhir, di Komisi V ini beredar grup apa di WA grup itu banjir di Bengkulu, ini sumbernya dari mana Pak Dirjen dan bagaimana cara mengantisipasinya agar tidak terulang lagi banjir yang semacam ini.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih, Pak Syaiful Tamliha.

Selanjutnya kami persilakan ke Pak Ketua, Ridwan Bae.

**F – P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:**

Makasih, Pak Pimpinan rapat. Pak Tamliha, terima kasih.

**Temen-temen Komisi V,  
Pak Dirjen yang saya hormati, juga termasuk  
Dirjen Pembiayaan, dan tentu dengan  
Seluruh jajarannya,**

Saya langsung ke Dapil saja Pak, saya. Yang pertama yang jalan Morosi, Pak. Jalan Morosi itu di sampingnya Sungai Konaweha namanya. Itu jalan Morosi adalah salah satu terpadat akibat di sana ada pabrik *virtue, virtue dragon* dan di sana sudah dibuat jalan *rigid* beton, tetapi bahwa di situ ada sungai Pak yang tinggal kira-kira setengah meter lagi udah habis di situ, ada kurang lebih panjangnya 500 Meter. Saya kira mungkin Pak Dirjen bisa menanyakan kepada kepala balainya, karena di sana memang sudah sangat riskan sekali.

Saya pernah dengan Pak Menteri, Pak Basuki ke sana mendampingi beliau waktu itu, memang sudah sangat riskan sekali. *Nah*, kalau tidak tertangani 2023 ini Pak Dirjen itu kita ragu *rigid* beton yang ada sekarang itu akan hancur kembali, paling tidak kalau tidak sekaligus barangkali tentu bertahap sehingga kalau banjir datang itu tidak mengakibatkan hancurnya jalan yang *entar* dibangun, Pak. Itu yang pertama.

Yang ke dua, di Kabupaten Muna itu ada jalan apa namanya ada pantai. Di Kabupaten Muna dan Kolaka Utara, kita minta tolong juga di situ agar diperhatikan alat penahan gelombang. Pantai di Kota Raha itu adalah ada stadion dayung, Pak. Stadion dayung di situ cukup baik stadion dayungnya, tapi akan hancur itu kalau tidak segera ditalut dengan baik.

Begitu pula jalanan di Kolaka Utara, itu jalan. Yang akan akhirnya menjadi jalan nasionalis itu sudah mulai hancur dihantam gelombang Pak, itu cukup panjang, barangkali juga bisa menjadi perhatian.

Lagi-lagi memang data itu semua ada di Kepala Balai, Pak, Pak Agus yang ada di sana. Saya yakin Pak Agus bisa memberi informasi lebih lengkap tentang itu kepada Pak Dirjen Sumber Daya Air. Itu kira-kira yang saya ingin sampaikan, Pak.

Kemudian, Pak Dirjen Pembiayaan, Pak. Mungkin saya minta penjelasan tentang kemungkinan pembiayaan kalau jadi ya itu jembatan penghubung Buton-Muna yang disebut Tona. Itu kira-kira pembiayaan yang paling tepat apakah APBN, apakah misalnya KPBU atau misalnya bantuan luar negeri atau yang mana yang tepat. Kita minta itu supaya masyarakat bisa mengetahui bahwa itu bisa terbangun dengan secepatnya. Barangkali itu saja, Pak Dirjen.

Terima kasih, Pak Ketua.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih, Pak Ridwan Bae.

Selanjutnya, yang terakhir dari saya Pak Dirjen ingin menambahkan beberapa hal. Yang pertama ingin menitikberatkan kepada hasil Kunker reses ataupun Kunker-Kunker spesifik yang telah dilaksanakan oleh seluruh Anggota Komisi V agar betul-betul mendapatkan prioritas atau perhatian dari Bapak dalam upaya penanganannya sesuai dengan hasil kunjungan kerja tersebut.

Beberapa hal tadi sudah disampaikan, termasuk di antaranya menyangkut masalah penanganan banjir di sungai Pangkajene Pangkep dan kemudian juga Bendungan Mujur yang kami juga baru-baru Kunker reses ke Lombok Tengah. Kami harapkan itu semua mendapatkan prioritas buat Bapak, dari Bapak, karena ini semua melalui proses kunjungan kerja secara resmi dari Komisi V.

Kemudian, dari bahan paparan yang Pak Dirjen Sumber Daya Air berikan ke kami tidak dapat kami lihat realisasi fisik sesuai dengan rencana keuangan maupun, ataupun rencana fisik yang ada. Jadi, kami tidak mengetahui apakah penyerapan anggaran Bapak atau pelaksanaan kegiatan Bapak di Tahun Anggaran 2022 ini deviasinya negatif atau positif. Ya, kami harap untuk yang bahan berikutnya nanti bisa menjadi bahan buat kami untuk menilai apakah pencapaian yang ada sekarang ini lebih baik dari perencanaan atau mungkin negatif daripada perencanaan awal.

Selanjutnya, menyangkut masalah kegiatan padat karya tunai untuk absah. Kami mendapat informasi bahwa, untuk sampai saat ini belum ada realisasi sama sekali, yaitu masih nol dari target 4.550 orang di 455 lokasi. Jadi, saya minta penjelasan Pak Dirjen apa menjadi kendala, kenapa seperti, program padat karya tersebut tidak dapat berjalan sebagaimana yang kita harapkan.

Selanjutnya, menyangkut masalah bendungan-bendungan normalisasi bendungan mungkin, Pak, bahwa betul kita saat ini banyak membangun bendungan-bendungan baru, tapi yang perlu kami ingatkan kepada Pak Dirjen bahwa, banyak bendungan-bendungan kita sekarang ini yang juga fungsinya semakin menurun dengan ada banyaknya sedimen-sedimen ataupun endapan yang masuk ke bendungan kita sehingga kemudian daya tampung airnya semakin berkurang, jadi fungsinya semakin menurun sehingga untuk pemenuhan, pemenuhan air bakunya juga tentu menjadi menurun dan di samping itu mengakibatkan banjir, Pak.

Seperti contohnya di sungai, di Bendungan Awo di Kabupaten Wajo itu. Itu juga terjadi pendangkalan sehingga kemudian debit air yang ditampung itu semakin berkurang.

Selain daripada itu tentunya untuk air, kebutuhan air baku itu juga menjadi tidak sesuai dengan desain layanan yang telah direncanakan sebelumnya. Jadi, mungkin butuh Pak, semacam apa namanya normalisasi atau apa dibuat bendungan-bendungan atau waduk yang lama.

Kemudian, menyangkut masalah pengendalian banjir di Dapil kami, Pak. Kemarin Tahun Anggaran 2022 ini ada untuk Sungai Walanae atau dan Sungai Cendranae. Itu, cuma anggarannya sangat minim, tidak *eh*, 10 Miliar kalau *nggak* salah pagu DIPA nya dan kemudian dilelangkan dengan harga yang cukup terbanting lagi, kurang lebih hanya 6 Miliar kalau *nggak* salah nilainya atau bahkan 7 Miliar ya.

Kami berharap bahwa, kebutuhan anggaran di wilayah itu cukup optimal Pak Dirjen, karena dengan anggaran yang dialokasikan Tahun 2022 ini belum bisa menyelesaikan, bahkan belum sampai 50% yang mampu diselesaikan dengan anggaran itu karena cukup panjang dan ada di beberapa titik walaupun misalkan dia beda kecamatan, tetapi dalam satu arus sungai Pak, satu ruas sungai *gitu*. Jadi, mohon agar supaya saya melihat di sini untuk pengendalian banjir pengaman pantai total 5,88 Triliun tapi yang Bapak gambarkan di sini hanya kurang lebih 27 paket dan itu belum masuk. Harapan saya sungai Walanae dan sungai Cendranae juga mendapat perhatian dari Bapak.

Kemudian untuk Dirjen Penyediaan Perumahan, Pak. Saya berharap bahwa program KPBU juga Bapak mungkin kalau boleh tahap penyiapan. Salah satu kendala di Sulawesi Selatan itu untuk poros nasional adalah poros Maros Bone, ini luar biasa juga Pak, kemacetan-kemacetan di sana karena jalan ini menghubungkan Provinsi Sulsel dan Provinsi Sulawesi Tenggara tempatnya Pak, Pak Ridwan Bae. Jadi, ini karena berkelok-kelok, siapa tau ada Bapak boleh programkan untuk KPBU jalan Tol Maros – Bone ataupun yang dari Makassar ke Maros, Pak.

Salah satu yang paling apa namanya, paling tinggi tingkat kemacetannya saat ini di Sulawesi Selatan itu adalah poros Maros – Makassar. *Nah*, ini yang kita harapkan tadinya dari program Maminasata bisa menyelesaikan permasalahan itu, tapi saya kira coba Bapak apa namanya melihat jalan keluar baru apakah dengan sistem *flyover*, apa namanya jalan

layang, apakah kira-kira IRR-nya masuk untuk di KPBU kan dan lain sebagainya, tapi kalau bisa distudikan dulu Pak atau *gimana* persiapan Bapak.

Selanjutnya selain itu tentu kelanjutan jalan layang perkara ini, itu indah sekali Pak, enak kami sekarang di jalan patarani sudah tidak macet tapi masih sangat *sih*, sangat pendek. Kita ingin mungkin ada program lanjutannya, kalau bisa sifatnya menjadi jalan lingkar Kota Makassar. *Nah*, itu Pak Dirjen mohon dipersiapkan pola KPBU nya mungkin, Pak.

Selain itu, kami juga ingin menyampaikan menyangkut masalah rumah KPR bersubsidi. Setahu kami wajib dihuni minimal selama setahun, tetapi kemudian ternyata banyak rumah-rumah KPR bersubsidi ini tidak ditinggali Pak karena minimnya faktor prasarana dan sarananya, terutama menyangkut masalah akses *road* atau kesiapan air bersih. Jadi, ini mengakibatkan seolah-olah KPR bersubsidi ini menjadi tidak tepat sasaran, Pak Dirjen. *Nah*, itu mungkin harapan dari kami agar supaya menjadi perhatian dari Pak Dirjen penyediaan, pembiayaan infrastruktur dan perumahan.

Selanjutnya, dari kami pribadi selesai dan saya akan menyerahkan kepada Pak Dirjen Sumber Daya Air dan Dirjen penyediaan, Pak Dirjen Pembiayaan untuk menjawab apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan ataupun pendalaman dari teman-teman Anggota Komisi V. Untuk kesempatan pertama akan saya serahkan kepada Pak Dirjen Sumber Daya Air. Silakan, Pak.

**DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA AIR KEMENTERIAN PUPR RI (Ir. JAROT WIDYOKO Sp-1):**

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

Saya akan menjawab dengan singkat dan padat, *Insha* Allah bisa menyambung apa yang ditanyakan oleh Bapak-Ibu yang kami hormati.

Yang pertama mengenai tadi sebesar, mengenai Bendungan Mujur. Bendungan Mujur dari hasil Kunker atau apa kunjungan tim dari DPR RI ke NTB bahwa sekarang tahun ini larap sudah Pak Mulyadi, larap sudah dan kami harapkan nanti segera di, kan kalau *nggak* salah *design*-nya Tahun 2015 atau 2014 segera kami akan, selanjutnya akan *review* di AMDAL.

Lalu juga untuk Mandalika, Bapak. Kami laporkan bahwa, kita menunggu Mujur kan masih lama, sehingga kami membuat saluran dari Bendung Pengak itu kurang lebih 150 sehingga mungkin dalam 2-3 tahun itu sudah tercukupi untuk air baku di Mandalika.

Selanjutnya, kami sampaikan juga laporan mengenai progres apa Cikeas dan Cileungsi, Pak. Tahun 2020 sudah DED, sehingga kami rencanakan nanti ada LARAP dan *dopping* untuk kegiatan 2023.

Lalu juga untuk Cibeet Cijurey, ini *review* desain tahun ini Pak sehingga kami harapkan ini menjadi progres *update* oleh Pak Mulyadi dan saya juga

sudah sering kami sama informasi *update* secepat mungkin, malah sebenarnya tahun ini sudah ada *cantelan*, Pak, tetapi kalau seandainya *review*-nya belum selesai kami programkan mulai Tahun 2023, karena juga kami memerlukan untuk membangun suatu bendungan ada sertifikat *design* Pak, tapi kami akan progres terus karena memang masanya sekarang adalah kecepatan dan kecepatan.

Selanjutnya, mengenai Bendungan Riam Kiwa. Bapak Syaifullah, kami sampaikan bahwa DED udah selesai Tahun 2021 dan perlu sekarang sedang proses kami paralel Bapak mengenai izin pelepasan kawasan dan Pemerintah China *alhamdulillah* sudah menyetujui Februari 2022 kemarin untuk pendanaan dari *loan* China dan sekarang sedang finalisasi di Bappenas. Kami harapkan 2023 sudah bisa mulai, seperti yang sekarang kita lakukan di Bendungan Jenelata di Makassar kalau *nggak* salah itu juga sudah, malah sudah tanda tangan kontrak itu, Pak.

Kami sudah tanda tangan kontrak Bapak dan ini *insya* Allah dengan kita ngurus nolnya untuk, karena setiap tahap juga ada persetujuan-persetujuan, ini yang kami apa terobos persetujuan jangan terlalu lama Pak, sehingga kami setiap *anu* membuat surat dari kami, ini sudah masuk mohon percepatan, mohon percepatan si. Iya, namanya *loan* setiap *anu* sudah ada Pak, hanya kita nunggu nolnya, nunggu persetujuan.

Lalu juga untuk Ibu Novita bahwa, nanti embung-embung yang tadi ada beberapa usulan yang nanti kami lihat usulannya bagaimana dan kami akan mengikuti apa yang menjadi prioritas Ibu.

Lalu untuk Pak Sudewo, ini ada usulan dipertanyakan tindak lanjut daripada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019. *Insya* Allah, Pak pengelolaan PP, Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun 2022 ini sudah segera bisa diselesaikan termasuk PP untuk irigasi, sedangkan PP mengenai sumber air *Insya* Allah untuk awal Tahun 2023, selesai.

Lalu juga mengenai apa yang disampaikan oleh Bapak Sudjadi mengenai embung akan kami segera apa yang menjadi masukkan dan usulan Bapak kami segera percepat yang mengenai daerah Dapil tadi. Lalu juga mengenai Pak Irmawan, ini *insya* Allah mengenai Pantai Meulaboh. Ini memang kami program kan di 2023.

Selanjutnya mengenai Pak Bakri, iya Pak kami mengenai longsor Kabupaten Tebo dan *Insya* Allah yang di Batang Hari nanti 2023, di untuk Sungai Batanghari, sedangkan untuk apa Kabupaten Tebo akan kami segera apa namanya penanggulangan darurat Pak, kami segera komunikasikan, apakah, biasanya kalau darurat Pak, *insya* Allah dari balai kami segera turun, apa yang bisa kami lakukan misalnya kayak kemarin di Cisarua alat, alat kami yang turun duluan. *Insya* Allah kalau ini memang sangat diperlukan kami segera perintahkan kepada kepala balai saya kira hari ini juga mendengar, Pak dan saya minta segera turunkan dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya mengenai tadi Bapak *iri*, Pak Bapak Wakil.

**F – PAN (H. A. BAKRI HM., S.E.):**

Terima kasih, Pak. Terima kasih.

**DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA AIR KEMENTERIAN PUPR RI (Ir. JAROT WIDYOKO, Sp-1.):**

Siap Bapak, sama-sama.

Untuk Bapak Syaifullah, untuk mengenai daerah irigasi rawa Pak selain tadi dari yang kami sampaikan Riam Kiwa. Kami memang beberapa hal kita cek untuk perbaikan-perbaikan kalau masalah pintu segera kami cek Pak untuk, karena di sana memang, saya 25 tahun di daerah Kalteng, Pak, jadi tahu daerah rawa itu seperti apa *insya* Allah. Kalau mohon berkenan daerah irigasi rawa daerah mana Pak ya yang.

**F – PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., M.S.) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:**

Hulu Sungai Utara, Pak.

**DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA AIR KEMENTERIAN PUPR RI (Ir. JAROT WIDYOKO, Sp-1.):**

Ya?

**F – PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., M.S.) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:**

Hulu Sungai Utara. Hulu Sungai Utara.

**DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA AIR KEMENTERIAN PUPR RI (Ir. JAROT WIDYOKO, Sp-1.):**

Oh Hulu Sungai Utara. *Nggih* Pak, saya kira ini juga kepala balainya juga mendengar Pak, biar segera cek melihat apa yang menjadi urusan.

**F – PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., M.S.) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:**

Sudah dicek Pak, tapi belum dikerjakan.

**DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA AIR KEMENTERIAN PUPR RI (Ir. JAROT WIDYOKO, Sp-1.):**

Oh gitu, oke nanti segera kami tagih kalau begitu, Pak. Terima kasih, Bapak.

Lalu juga Pak Ridwan Bae. Saya kira ini segera kami *anu* Bapak, terutama yang untuk jalan saya kira ini kritis sekali.

Lalu juga mengenai Pak Pimpinan rapat sendiri, mengenai hasil Kunker Bendungan Mujur, lalu realisasi fisik. Ya, ini menjadi masukan yang baik Bapak, untuk membandingkan realisasi dan perencanaan. Lalu juga padat karya yang untuk terutama Pak, ABSAH untuk Tahun 2022 kebetulan masuk, karena kemarin ada begini sehingga itu masuk ke *justice adjustment*, sehingga *moga-moga* kalau itu bisa keluar seperti yang disampaikan oleh Bapak Hamka *insya Allah* bisa segera kami lakukan.

Lalu ya, memang ini sedimen ini menjadi salah satu kondisi yang ada di sekitar. Kami juga mohon dukungan Bapak. *Cashment* area, pemakai pemanfaat *cashment* area. Saya kira di rapat-rapat kemarin sudah kami sampaikan tapi apa yang menjadi tugas kami semaksimal mungkin Pak, termasuk untuk bendungan-bendungan kami juga sudah memikirkan di daerah hulu-hulu bendungan kami akan menyiapkan paling tidak penangkap sedimen penangkap sedimen. Terima kasih.

Lalu juga mengenai tadi Walanae dan sungai Chandra tadi Pak *njih*, Chandranae *njih*. Chandranae ya, kami akan melihat apakah, ini kan tinggal menambah Pak ya. Kalau kemarin memang, saya kira kalau tadi Bapak kami akan optimalisasi dan betul-betul apa semaksimal mungkin kami optimalisasi.

2:01:44

Lalu juga dari ada Bu Cen Sui yang mengenai jalan, Ibu. Itu kami respon dan ternyata itu masih nihil. Siap. *Njih*, jadi kami laporkan, saat itu kami segera koordinasi dengan Bapak Dirjen Bina Marga dan mendapat informasi ternyata itu masih dalam masa pemeliharaan Ibu, sehingga perbaikan tebing, walaupun itu tebing laut tetapi yang membuat jalan kebetulan teman-teman dari BM itu masih dalam pemeliharaan dan kebetulan mohon maaf yang longsor adalah tanah-tanah timbunan yang dari atas. *Nggih*. Siap, Bapak.

Lalu untuk Pak Harvey, saya kira ini masukan yang sangat bagus untuk Dapil Papua Barat. Lalu juga Pak Aras. Pak, kami juga akan kami perhatikan betul mengenai P3TGAI di wilayah Dapil di provinsi tersebut, terima kasih ini menjadi koreksi bagi saya untuk makin memperhatikan ini.

Lalu juga Pak Syahrul bahwa, ini untuk pengaman pantai, termasuk untuk penghasil kelapa tadi ya Bapak. Ini kami usahakan semaksimal mungkin termasuk pengaman tebing. Lalu juga Pak Irmawan saya kira tadi sudah kami sampaikan mengenai pengendalian banjir, ada beberapa yang sudah kami programkan untuk melalui SBSN.

Lalu juga ini menjadi perhatian juga mengenai apa dari Pak Hamka untuk daerah irigasi, Pak. Mengenai yang pompa, memang sekarang kami sedang di ketat betul untuk produksi dalam negeri, tapi akan kami maksimalkan.

Lalu juga masukan yang bulan-bulan kemarin Bapak, apa namanya, mengenai banjir ini memang luar biasa tetapi kalau belum masuk di program



kami upayakan dengan OP-OP yang ada. Iya, jadi ini yang kami lakukan dan saat ini kami terus terang perlu tambahan kurang lebih 300-an Pak, untuk bencana dan tahun ini saya kira luar biasa Pak, bencana yang terjadi dari Sabang sampai Merauke tapi juga itu kami sangat ketat, selain usulan juga kami verifikasi BPKP juga ada namanya *value engineering*, Pak.

Jadi, kami betul-betul kalau orang bahasanya *diperes-peres semak*, seoptimal mungkin sehingga kepentingan-kepentingan yang sangat penting tidak tidak terlewatkan.

Saya kira secara umum bisa demikian yang kami sampaikan Bapak, kalau ada yang kurang berkenan kami mohon maaf dan untuk Bapak ini kelewatan, Pak Eddy Santana. Bapak kami sangat *concern* di sana untuk pengendalian banjir Kota Palembang dan ini saya harapkan malah kepala balainya segera minta coba FGD paling tidak di provinsi *sumu, eh* Sumatra Selatan, Pak. FGD sehingga akan menjadi solusi yang terbaik mana yang prioritas.

Kami sudah minta kepada kebetulan kepala balainya baru Pak, Pak Maman, kami harapkan dalam waktu segera untuk FGD. Ini salah satu mencari lubang-lubang yang paling baik, solusi yang terbaik untuk Kota Palembang.

Demikian Bapak Pimpinan, Bapak Ketua yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih kami mohon maaf.

Akhir kata.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Pak Dirjen, makasih.

**F – PKB (H. DEDI WAHIDI, S.Pd.):**

Izin, Pak Ketua. Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Sebentar, sebentar, sebentar. Pak Dedi dulu selanjutnya Pak.

**F – PKB (H. DEDI WAHIDI, S.Pd.):**

Pak Dirjen, itu usulan saya belum dijawab, Pak Dirjen. Embung yang belum ada salurannya itu, Pak. Saluran irigasi Embung Wanakaya, Pak. Embung Desa Wanakaya, Argolis Indramayu, Pak. Iya, Pak.

**KETUA RAPAT:**

Tadi tertulis, Pak?

**F – PKB (H. DEDI WAHIDI, S.Pd.):**

Ada tertulisnya.

**KETUA RAPAT:**

Ya udah, berarti tunggu dijawab pada rapat berikutnya, *insya* Allah Pak Dirjen akan masukkan ke dalam program Pak Dedi. Selanjutnya Pak Sumail. Silakan, Pak.

**F – P. GERINDRA (Ir. SUMAIL ABDULLAH):**

Ya, yang saya terlewat nampaknya, Pak Dirjen. Iya, Waduk Sampean yang ada di Tapen Bondowoso sama ada dua pengaman pantai itu, Pak.

Makasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik. Ibu Cen Sui? Tadi baru sekali ini saya denger namanya Bapak-Ibu dipanggil Cen Sui, biasanya Ibu Cen atau Cen Sui Lan, tapi Pak Dirjen panggilnya khusus Ibu Cen Sui.

Kemudian Pak, tadi *nggak* ditanggapi menyangkut masalah banjir bandang Bengkulu pertanyaan Pak Syaiful Tamliha, kasih *tau* ke kepala balainya jangan ke mana-mana itu, Pak, dia harus selesaikan banjirnya itu.

**DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA AIR KEMENTERIAN PUPR RI (Ir. JAROT WIDYOKO, Sp-1.):**

Siap, Bapak.

**KETUA RAPAT:**

Baik, Pak Dirjen.

**DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA AIR KEMENTERIAN PUPR RI (Ir. JAROT WIDYOKO, Sp-1.):**

*Nggih*, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Selanjutnya saya persilakan kepada Dirjen Pembiayaan, silakan Pak Herry.

**DIREKTUR JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN KEMENTERIAN PUPR RI (Ir. HERRY TRISAPUTRA ZUNA, S.E., M.T):**

Baik, kami mencoba merespon tadi yang Bapak-Ibu sampaikan. Pertama dari Pak Sudewo, ya. Terkait dengan KSA, mohon izin ini memang bukan sama sekali bukan kebijakan kami, ini adalah yang di apa diusulkan oleh Bappenas. Jadi, KSA ini memang usulan Bappenas walaupun secara konsep memang KSA ini memberikan pilihan kepada kita, proses yang lebih cepat, karena ada di dalam negeri dari apa perbankan yang ada di dalam negeri.

*Nah*, terkait dengan KSA tadi, ini memang untuk ruasnya Betung-Jambi, Bapak. Jadi, untuk Betung-Jambi pilihan sebetulnya sudah masuk di gerembuk, tetapi hari ini masih ada pembahasan dengan Kementerian Keuangan berkaitan dengan sumber pendanaannya. Mudah-mudahan bisa segera apa selesai dan proses pengadaan tanah dan pembangunannya bisa segera kita mulai.

Untuk KPBU yang lain, ini memang upaya kami untuk apa semakin banyak yang bisa kita lakukan dengan skema KPBU sehingga infrastruktur yang bisa didorong juga semakin besar seperti itu. *Nah*, yang tadi disampaikan yang catat, beberapa catatan ini akan ke apa, akan kami tindaklanjuti Pak Dewo terkait dengan investasi tadi.

Selanjutnya, yang ruas Demak-Tuban. Hari ini, saat ini memang sedang dalam proses penyusunan EBC atau studi kelayakan. Jadi, harapannya beserta dengan *readiness* kriterianya bisa kita siapkan tahun ini, Tahun 2023 bisa siap untuk dilakukan pelelangan.

Hal yang sama juga dengan jalan Tol Cilacap-Jogja. Ini sepanjang kurang lebih 121 Kilometer membutuhkan biaya sampai sekitar 38 Triliun ya. Tahun ini sedang studi Bu Novita, harapannya juga Tahun 2023.

Ibu Cen tadi yang berkaitan dengan apa komponen yang 50 Miliar ini memang kesepakatan di awal di provinsi ya, Bu ya, namun permintaan dari *lender* meminta penyelidikan yang lebih dalam sehingga membutuhkan biaya yang besar tadi. Nanti kami akan apa tindak lanjut dengan Ditjen Bina Marga bagaimana nanti solusinya, sehingga prosesnya bisa berjalan, apa dengan tetap memenuhi apa yang diinginkan oleh *lender*-nya.

Lalu yang Pak Bakri tadi Pak, yang berkaitan dengan penanggulangan banjir di Kota Jambi. Prinsipnya memungkinkan sekali KPBU kita terapkan untuk apa penanganan banjir seperti ini. Skema yang mungkin adalah dengan skema *availability payment* nanti mungkin kami akan dalam Pak Bakri ya bersama dengan Pak Jarot ya, yang banjir tadi, Pak. Nanti kami coba studi bersama Pak Jarot kemungkinannya, kebutuhannya seperti apa nanti kita carikan skema pembiayaan yang bisa lebih cepat.

Kemudian, dari Pak Ridwan Bae tadi yang berkaitan dengan jembatan Muna, Munabuton, Pak. Memang pada dasarnya yang paling murah ya kalau Pemerintah sendiri yang apa membangun ya dengan APBN murni, tetapi apa kalau kita bandingkan kepastiannya tentu SBSN akan lebih pasti karena dia bertahun. *Nah*, di atas itu tentu yang PHLN akan apa memberikan kepastian,

tapi seringkali PHLN ini banyak apa kepentingan sehingga prosesnya akan lama.

*Nah*, untuk *availability payment* karena dilakukan oleh badan usaha, kecenderungannya biayanya akan membengkak sehingga memang harus dipilah kapan kita pakai AP, kapan kita pakai SBSN atau hutang. *Nah*, sejauh dia masih dalam batas defisit sebaiknya kita pakai yang hutang atau SBSN yang *below the line*, tapi kalau batas itu sudah lebih ya kita dorong pakai *availability payment* karena dia dibayarnya tahunan seperti itu, itu mungkin untuk yang Pak Ridwan.

Kemudian, yang terakhir dari Pak Ketua tadi, yang Bone – Maros-nya kami akan apa catat dan siapkan untuk studinya. *Nah*, untuk Makassar – Maros dan lanjutan dari petarani saat ini sedang dilakukan oleh studi oleh badan usaha yang kemarin memang Petarani, Pak. Jadi, harapannya ini bisa dilanjutkan seperti itu apa dengan tambahan lingkup kepada yang ada. Jadi bisa apa prosesnya juga bisa lebih cepat.

*Nah*, berkaitan dengan rumah subsidi. Ini harusnya bukan hanya satu tahun Pak, harusnya 5 tahun. 5 tahun harus ditunggu ya dan tadi yang Bapak sampaikan infrastruktur juga merupakan hal yang harus dipenuhi, jadi sarana air dan jalan tadi harus ada. *Nah*, ini memang apa menjadi apa perhatian kami dan sudah kami apa ingatkan berkali-kali dengan bank penyalur ya, ke depan kami akan lebih intensifkan kembali Pak untuk agar hal-hal seperti ini tidak terjadi.

Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.

#### **KETUA RAPAT:**

Baik, terima kasih Pak Dirjen.

Jadi banyak yang kosong akhirnya Pak, rumah-rumah itu karena faktor tadi air bersihnya kurang, terus akses *road* nya kurang. Jadi, mudah-mudahan ke depan menjadi perhatian.

Ada yang mau ditambahkan Pak Roberth? Silakan.

#### **F – P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:**

Terima kasih.

**Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi V yang saya hormati,  
Saudara Dirjen Sumber Daya Air dan jajaran,  
Saudara Dirjen Pembiayaan Infrastruktur dan seluruh jajaran,**

Saya tidak terlalu banyak yang saya ingin sampaikan kepada Dirjen Sumber Daya Air saja yang perlu menjadi perhatian. Ada beberapa proposal yang sudah kami disampaikan, ini koreksi lagi kembali yang belum masuk, nanti saya akan berikan proposal. Mohon agar menjadi perhatian Pak Dirjen

supaya proposal yang kami berikan ini harus ada tergambar nanti sesuai dengan kemampuan Kementerian, tapi harapan saya jangan mampunya cuma satu, Pak Dirjen. Kalau kita mampunya dari, kalau kita usul 10 ya minimal ada 11 masuklah.

Ya kan, satu Pak Menteri, Pak Menteri punya, yang sepuluh kita punya *gitu*, ya kan. Ketok ya. Iya, jadi. Oh itu *fifty-fifty* ya. Ya, *fifty-fifty*, 60:40 katanya, ya.

Jadi, ini yang ingin saya minta perhatian Pak Dirjen. Saya terima kasih Pak Dirjen ya, saya mendapat laporan juga bahwa kasus yang saya selalu teriak di sini, itu balai airnya di Papua itu sangat, menurut saya harusnya seperti itu kepala balai. Bahwa yang tidak, bukan tidak layak, bahwa itu tidak masuk akal itu bisa menangkan itu ditolak *gitu* dan itu berhasil dan sekarang lelang ulang. Ya harus seperti itu *gitu*, jangan seperti Dirjen lain, ikut saja, akhirnya nanti putus kontrak atau jadi-jadian artinya proyek itu ya kan. Ini yang harus betul-betul diperhatikan *gitu* ya kan.

Saya berikan apresiasi untuk Kepala Balai Sumber Daya Air di Papua. Hari ini mereka lagi di tempat saya di Kepulauan Yapen di Serui itu lagi lihat survei di sana karena di sana karena kebetulan kemarin kena banjir maka mereka lagi di sana. Ini terus terang saya berikan apresiasi itu Pak Dirjen, khusus untuk kepala balainya ya, itu yang harus dilakukan bukan ikut-ikutan saja nanti bermasalah ya dan Dirjen dukung ya, jangan kayak Dirjen yang lain malah kepala balainya ditekan untuk tanda tangan, ya. Saya *nggak* enak *ngomong* namanya nanti di sini. Engga, di salah satu Dirjen di PU, Pak, ya kan, cuma bukan sumber daya air kan ini ya. Ya itu jadi, ya harapan kami itu, Pak Dirjen.

Kita ingin supaya apa yang kami putuskan di sini itu betul-betul nanti manfaat dan kelayakan itu kita dapat pertanggungjawabkan semuanya ya. Jangan jadi proyek jadi-jadian kalau itu jadi atau proyek terbengkalai di sana itu.

Jadi itu Pimpinan, saya berikan apresiasi itu dan Pak Dirjen nanti saya akan berikan proposal, mohon nanti dilihat yang dapat diakomodir tolong ya. Saya melihat itu ada 2023 yang sudah masuk itu ada apa Sungai Wanggar ya, jadi itu Daerah Nabire ya, itu ada masuk, tapi cuma satu kalau saya lihat ya. Nanti tolong dikoreksi lagi Pak Dirjen ya, karena kita butuh masih banyak khusus penanganan karena kita daerah kita sekarang sudah mulai kena dampak banjir-banjir yang dulunya tidak pernah sekarang sudah banjir, berarti ada yang salah. Ini yang perlu kita sama-sama melihat itu.

Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Pimpinan atas waktu yang diberikan. Saya kembalikan, Pimpinan.

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Roberth Rouw, apa mau diserahkan sekarang, Pak? Boleh. Pak Dirjen, beliau ini jarang-jarang pakai, pakai merahmu. Silakan,

silakan Pak. Ini jarang-jarang pakai warna ungu, warna jomblo Pak, jadi beliau hari ini agak-agak santai. Silakan, Pak Ridwan. Boleh, Pak Aras silakan. Pak Syaiful Tamliha. Saya pakai e-mail, Pakde. Kebanyakan, ini pakai e-mail aja. Pak Harvey, silakan. Pak Anang. Pak ini premannya Komisi V, Pak.

**PESERTA RAPAT:**

Ini Pak Hamka B ini dua kali, Pak, tadi juga ini juga.

**KETUA RAPAT:**

Kayaknya udah dua kali penyerahan beliau ini. Tumben-tumben pakai jas, ganteng kali hari ini.

**F- P. GERINDRA (Drs. H. MULYADI, MMA.):**

Ketua izin, Ketua. Satu, sat.

**KETUA RAPAT:**

Silakan, Pak.

**F- P. GERINDRA (Drs. H. MULYADI, MMA.):**

Ini saya konsultasi ke Pakde karena Pakde sampaikan ke penguatan.

Pak Dirjen, terkait target utama Tahun Anggaran 2023 beliau setuju bahwa, saya harus mengingatkan dua kata yang membahayakan Pak, antara lain. Jadi, proyek-proyek yang harus di-*breakdown* ya, *confirm* ya. Kenapa, untuk kami di wilayah di daerah pemilihan terutama memudahkan sosialisasi, Pak.

Ada pengalaman lain *nih*, Pak Ketua. Jadi, suatu saat target utama di Tahun Anggaran berikutnya disampaikan tapi pada saat laporan saya pernah katanya mengusulkan ini program aspirasi Pak, pengalaman pribadi, mengusulkan pembangunan rusunawa di Garut, saya *nggak* pernah ngusulin itu, Pak. Jadi ini membahayakan dalam tanda petik, kalau kita tidak *breakdown* kami buta petanya Pak, terhadap proyek-proyek di Dapil kami terutama. Itu saja, Pimpinan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Ya. Terima kasih, Pak Mul.

Jadi lokusnya jelas Pak, kegiatannya jelas. Jadi, apa namanya supaya teman-teman bisa mengetahui dan benar apakah usulan-usulan itu yang kami sampaikan sudah terakomodir dengan baik atau tidak dan jangan sampai Pak kadang-kadang di berkas ini ada, tiba-tiba pada saat lelang berikutnya udah

*nggak* ada tuh barang ya *nggak*. Lebih parah lagi, PHP itu namanya. Karena ada juga Dirjen yang seperti itu, tapi bukan Dirjen SDA, Pak.

**DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA AIR KEMENTERIAN PUPR RI (Ir. JAROT WIDYOKO Sp-1):**

*Ndak*, kalau SDA *nggak* Pak, SDA baik selama ini.

**KETUA RAPAT:**

SDA baik, Pak.

**DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA AIR KEMENTERIAN PUPR RI (Ir. JAROT WIDYOKO, Sp-1.):**

Baik, baik, saya janji.

**KETUA RAPAT:**

Ya. Iya Pakde, betul Pakde. Baik. Baik,

**Bapak-Ibu sekalian,**

Setelah mendengarkan penjelasan dan tanggapan dari para Dirjen, Pak Dirjen Sumber Daya Air dan Pak Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, apabila sudah tidak ada lagi hal yang perlu dibahas maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Peraturan Tata Tertib DPR RI, kita akan merumuskan keputusan atau kesimpulan Rapat Dengar Pendapat pada hari ini untuk kita sepakati dan kita tanda tangani bersama.

Saya minta ditampilkan dan akan saya bacakan Bapak-Ibu sekalian yang pertama,

Draf Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Dirjen Sumber Daya Air Dan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Kementerian PUPR, 4 Juli 2022.

1. Terkait dengan evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022, Komisi V DPR RI meminta Ditjen Sumber Daya Air dan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR untuk meningkatkan penyerapan anggaran sesuai target penyerapan Tahun Anggaran 2022;
2. Komisi V DPR RI sepakat dengan Ditjen Sumber Daya Air dan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR untuk menyesuaikan rincian program dan menyempurnakan RKA K/L dalam RAPBN Tahun Anggaran 2023 secara lebih konkret, sesuai usulan dan pendapat Komisi V DPR RI

yang disampaikan dalam rangkaian proses pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2023.

**Bapak-Ibu sekalian,  
Anggota Komisi V dan Pimpinan Komisi V,**

Apakah kesimpulan tersebut dapat disetujui?

**F – P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS.):**

Sebelum disetujui, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Silakan, Pak Dr. Hamka.

**F – P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS.):**

Kebiasaan kita dalam rapat-rapat menyimpulkan itu ada angka-angka anggaran Bapak Tahun 2023. Hari ini belum kami simpulkan dan belum kita putuskan anggaran detail Bapak karena masih menunggu pembicaraan lanjutan terkait angka-angka tersebut.

Manakala terjadi pergeseran antar Dirjen, tentu keputusannya kepada Bapak Menteri. Ini, hari ini lain daripada yang lain keputusan kita, apa yang menjadi saran dan pendapat dari kawan-kawan usulan maksudnya harus disesuaikan dengan Anggaran RKA K/L Tahun 2023 karena ini masih sifatnya pendahuluan dan *insya* Allah setelah Pidato Kenegaraan Presiden Pengantar Nota Keuangan Agustus yang akan datang tanggal 16 pastinya baru kita akan menjabarkan secara detail dan merupakan keputusan *final* yang akan dilaksanakan 2023.

Makasih, Pimpinan.

*Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumsalam,*

Ini Pak Doktor ini mau menambahkan apa mau untuk menjelaskan kepada Pak Dirjen saja. Jadi menjelaskan kepada Bapak sekalian bahwa, anggaran Pagu Indikatif itu masih, masih bisa ada penyesuaian-penyesuaian tertentu, mungkin seperti itu Pak tapi kesimpulannya bisa disetujui Bapak-Ibu sekalian? Setuju, saya ketok dulu, Pak.

**(RAPAT: SETUJU)**

Pak Dirjen, Pak Dirjen Pembiayaan?



**DIREKTUR JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN  
UMUM DAN PERUMAHAN KEMENTERIAN PUPR RI (Ir. HERRY  
TRISAPUTRA ZUNA, S.E., M.T):**

Oke.

**KETUA RAPAT:**

**(RAPAT: SETUJU)**

Baik,

**Bapak-Ibu yang saya hormati,  
Para Dirjen yang saya hormati,**

Dengan telah disepakatinya beberapa kesimpulan.

**F – PDIP (Ir. SUDJADI):**

Saya hanya, kepada Pak *anu*.

**KETUA RAPAT:**

Baik, silakan Pakde nyalain *speaker*-nya, Pakde.

**F – PDIP (Ir. SUDJADI):**

Semua, hampir semua Direktorat Jenderal di Kementerian PU ada aspirasi, bagi tempat *panjenengan* ada aspirasi tidak? Saya itu hampir 12 tahun yang dulu anggaran bantuan untuk *real estate* itu ya kita *nggak* merasa itu aspirasi, bisa *nggak* anggaran *panjenengan* ada yang dirubah untuk aspirasi usulan infrastruktur desa. Jadi, tidak untuk usulan infrastruktur *real estate*.

*Matur nuwun.*

Karena selama ini ya kita *nggak*, selama 12 tahun *nggak* pernah bicara saya. Karena mau yang dibicarakan apa, ya saya bukan pengusaha *real estate*.

**KETUA RAPAT:**

Baik. Pak Dirjen, Pak Dirjen Herry, dicatat ya, Pak. Selanjutnya,

**Bapak-Ibu sekalian,**

Tadi sudah disepakati bahkan sudah diketok kesimpulan dan keputusan, maka rangkaian acara Rapat Dengar Pendapat pada hari ini telah selesai. Sebelum rangkaian acara ini kami tutup, kami berikan kesempatan kepada Pak, para Dirjen atau diwakili oleh satu salah satu Dirjen untuk menyampaikan sambutan akhir atau kata penutup. Silakan, Pak. Pak Herry atau Pak Jarot. Silakan, Pak Jarot.

**DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA AIR KEMENTERIAN PUPR RI (Ir. JAROT WIDYOKO, Sp-1.):**

**Yang kami hormati Bapak Pimpinan rapat,  
Bapak wakil Ketua Komisi V, dan  
Bapak, yang kami hormati Bapak-Ibu Anggota Komisi V,**

Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas masukan dan bimbingan dalam arti memberikan masukan kepada kami dalam rangka tujuan-tujuan program untuk yang bisa langsung dimanfaatkan oleh masyarakat. Tetapi, kami juga mohon maaf kalau seandainya belum bisa menjawab karena ini memang ada yang menjadi di luar kewenangan kami.

Demikian yang bisa kami sampaikan, kalau di dalam rapat tadi ada kami ada yang kurang pas sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Akhir kata.

*Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,*

**Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati,**

Rangkaian acara rapat pada hari ini telah kita selesaikan. Kami mohon maaf apabila ada hal hal yang kurang berkenan selama berlangsungnya rapat. Semoga hal-hal yang telah kita diskusikan dan kita putuskan dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara, *amin*.

Maka dengan hal, dengan mengucapkan *alhamdulillah* Rapat Dengar Pendapat pada hari ini dapat kita tutup dengan ucapan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.15 WIB)**

**JAKARTA, 4 Juli 2022**  
a.n. KETUA RAPAT  
SEKRETARIS RAPAT,

TTD

**NUNIK PRIHATIN BUDIASTUTI, S.H.**  
**NIP. 196912021998032002**